

**Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di
Kabupaten/Kota Jawa Tengah
Periode Tahun 2011-2016**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Nama : AnnisaDwi Rosalina
Nomor Mahasiswa : 14313339
Program Studi : Ilmu Ekonomi

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

**Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa
Tengah Periode Tahun 2011–2016**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi,

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Annisa Dwi Rosalina

Nomor Mahasiswa : 14313339

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Februari 2018

Penulis,


Annisa Dwi Rosalina

PENGESAHAN

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah

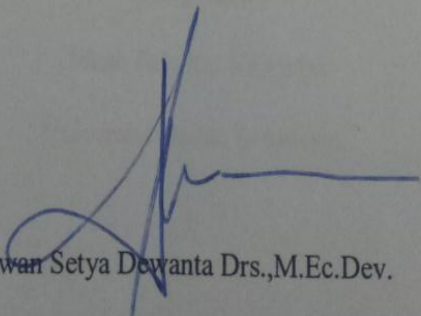
Periode Tahun 2011–2016

Nama : Annisa Dwi Rosalina
Nomor Mahasiswa : 14313339
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, Februari 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Awan Setya Dewanta Drs.,M.Ec.Dev.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA JAWA
TENGAH TAHUN 2011-2016

Disusun Oleh : ANNISA DWI ROSALINA

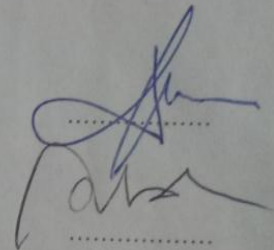
Nomor Mahasiswa : 14313339

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada hari Jum'at, tanggal: 16 Maret 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Awan Setya Dewanta, Drs.,M.Ec.Dev.

Penguji : Sahabudin Sidiq, Dr., SE., MA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

“Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal.

Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl : 96)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. al-Insyirah : 5-6)

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.”

(Q.S. : 7)

“Dan, orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.” (Al-Baqarah : 177)

“If we believe that tomorrow will be better, we can bear hardship today.” (Thich Naht Hanh)

“A person who never made a mistake never tried anything new.” (Albert Einstein)

“Kerjakanlah apa yang kamu sukai, jadilah konsisten, dan sukses akan datang dengan sendirinya.

PERSEMBAHAN



Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar
2. Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan
3. Keluarga besarku
4. Sahabatku
5. Semua teman Ilmu Ekonomi
6. Calon imam ku

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya yang memberikan jalan kemudahan dan keteguhan hati dari kesukaran, karena pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Periode Tahun 2011–2016”** Sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kami ke kehidupan yang terang-benderang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Awan Setya Dewanta Drs.,M.Ec.Dev. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, saran dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Dalam hal ini penulis sangat menyadari atas keterbatasan kemampuan yang dimiliki, sehingga penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan keterbatasan inilah, penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun bukanlah berdasarkan kemampuan penulis sendiri, melainkan karena mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga penyusunan ini bisa

diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar
2. Bapak Awan Setya Dewanta Drs.,M.Ec.Dev.. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama mengerjakan skripsi
3. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga menambah pengetahuan dan wawasan penulis
4. Bapak Anjar yang telah banyak membantu dalam urusan akademik
5. Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayangnya serta yang selalu menasehati dan memberi arahan dalam setiap masalah yang dihadapi penulis
6. Keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa membimbing, mendorong, mendoakan dan mencurahkan kasih sayang sehingga menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan studi jenjang strata satu ini
7. Teman-teman seperjuangan dari semester 1 yaitu Yovinda, Maya, Dita yang telah menjadi sahabat dan keluarga selama di Jogja. Memberikan semangat dan motivasi dalam belajar dan mengajari arti dari persahabatan
8. Teman dari masa SMA yang sama-sama di jogja (Yasmin) yang sabar mendengarkan keluh kesah dan selalu menyemangati. Menjadi orang yang selalu ada setiap dibutuhkan

9. Teman-teman seperjuangan dalam meraih gelar S1 Yenny dan Ade yang melewati susah senang bersama.
10. Riyan Azmi yang selalu menjadi tempat utama berkeluh kesah dan pemberi semangat serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, Februari 2018

Penulis

Annisa Dwi Rosalina

DAFTAR ISI

Halaman	
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahan Ujian.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Halaman Kata Pengantar.....	vii
Halaman Daftar Isi.....	x
Halaman Daftar Tabel.....	xiv
Halaman Daftar Gambar.....	xv
Halaman Grafik.....	xvi
Halaman Lampiran.....	xvii
Halaman Abstrak.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Batasan Masalah.....	8
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan dan Manfaat.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	12
2.1. Kajian Pustaka.....	12
2.2. Landasan Teori.....	18
2.2.1 Kemiskinan.....	18
2.2.1.1 Definisi Kemiskinan.....	18
2.2.1.2 Faktor Penyebab Kemiskinan	21
2.2.1.3 Ciri-ciri Kemiskinan.....	22
2.2.1.4 Macam-macam Kemiskinan.....	22
2.2.2 Inflasi	21
2.2.2.1 Definisi Inflasi	21
2.2.2.2 Faktor Penyebab Inflasi.....	24
2.2.2.3 Dampak Inflasi	24
2.2.2.4 Cara Mengatasi Inflasi.....	25
2.2.2.5 Hubungan Inflasi dengan Kemiskinan.....	26
2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	28
2.2.3.1 Definisi PDRB	28
2.2.3.2 Metode Perhitungan PDRB.....	28
2.2.3.3 Hubungan PDRB dengan Kemiskinan.....	30
2.2.4 Pendidikan	31
2.2.4.1 Definisi Pendidikan	31
2.2.4.2 Hubungan Pendidikan dengan Kemiskinan.....	32
2.2.5 Upah Minimum Kabupaten (UMK)	33
2.2.5.1 Definisi UMK	33

2.2.5.2 Hubungan UMK dengan Kemiskinan.....	34
2.3. Kerangka Pemikiran.....	35
2.4. Hipotesis Penelitian.....	3
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	37
3.2. Definisi Operasional Variabel.....	37
3.3 Metode Analisis Data.....	39
3.4 Uji Model.	40
3.4.1 Common Effect Model	40
3.4.2 Fixed Effect Model	41
3.4.3 Random Effect Model	41
3.5 Pemilihan Uji Estimasi.	42
3.5.1 Chow test (Uji Chow)	42
3.5.2 Uji Hausman	41
3.6. Karakteristik Statistik.....	43
3.6.1 Uji F.....	44
3.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	44
3.6.3 Uji T.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1. Deskripsi Data Penelitian	46
4.2. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
4.2.1 Kemiskinan	46
4.2.2 Inflasi	47

4.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	48
4.2.4 Pendidikan	49
4.2.5 Upah Minimum Kabupaten (UMK).....	50
4.3. Hasil dan Analisis.....	51
4.3.1 Pemilihan Model Regresi.....	52
4.3.1.1 Chow Test (Uji F-Statist).....	52
4.3.1.2 Uji Hausman	53
4.3.2 Hasil Pengujian Statistik	54
4.3.2.1 Koefisien Determinasi	56
4.3.2.2 Pengujian Signifikansi Parameter Individu (Uji t).....	57
4.3.2.3 Uji Kelayakan Model (Uji F)	59
4.3.2.4 Analisis Intersep	60
4.3.3 Intersep Hasil Dan Pembahasan	61
4.3.3.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat kemiskinan.....	61
4.3.3.2 Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	64
4.3.3.3 Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan....	65
4.3.3.4 Pengaruh UMK Terhadap Tingkat Kemiskinan	65
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	67
5.1. Simpulan.....	67
5.2. Implikasi.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Tingkat Kemiskinan di Indonesia	3
1.2. Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa.....	6
4.1. Chow Test (Uji F-statistik.....	53
4.2. Uji Hausman.....	64
4.3. Hasil Fixed Effect Model.....	64
4.4. Analisis Interpretasi	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	35

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
4.1 Penduduk Miskin Kabupaten Kota di Jawa Tengah.....	47
4.2 Inflasi Kabupaten Kota di Jawa Tengah.....	48
4.3 PDRB Kabupaten Kota di Jawa Tengah.....	49
4.4 Pendidikan Kabupaten Kota di Jawa Tengah.....	50
4.2 UMK Kabupaten Kota di Jawa Tengah.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I. Data Penduduk Miskin.....	71
II. Data Inflasi	72
III. Data Produk Domestik Regional Bruto	73
IV Data Pendidikan.....	74
V Data UMK	75
VI Data Gini Ratio	77
VII Hasil Olah Data	78

ABSTRAKSI

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang cukup kompleks yang di alami oleh masyarakat terutama masyarakat yang hidup dalam negara berkembang. Dalam mengatasi masalah kemiskinan ini tidak dapat dilakukan secara parsial saja namun juga harus menyakut berbagai aspek yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi faktor-faktor yang mempengaruhi presentase penduduk miskin 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode tahun 2011-2016. Adapun faktor-faktor yang di duga dapat mempengaruhi presentase penduduk miskin di Jawa Tengah meliputi Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang terdiri dari data cross section (35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah) dan data time series (2011-2016). Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel yang di lakukan dengan bantuan Eviews 8. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Inflasi, Pendidikan, dan UMK memiliki dampak yang negatif dan signifikan dan PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap presentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Variable Independent Inflasi, PDRB, Pendidikan, dan UMK secara bersama-sama berpengaruh terhadap penduduk miskin di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Kata kunci: Inflasi, PDRB, Pendidikan, UMK, Kemiskinan

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah guna meningkatkan perekonomian suatu negara yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerja baru agar pengangguran di negara tersebut dapat berkurang sehingga kesejahteraan penduduk di negara tersebut dapat terwujud. Apabila suatu Negara ingin berhasil dalam proses pembangunan maka kualitas sumber daya manusia dan juga laju pertumbuhan penduduk harus ditingkatkan dan jika tidak diimbangi dengan perluasan lapangan pekerjaan maka akan berakibat pada pengangguran. Pengangguran yang tinggi pada suatu negara akan mengakibatkan tingginya kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit ekonomi pada suatu negara yang seharusnya dapat dihilangkan atau pun paling tidak dapat dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional, maka pengentasan kemiskinan membutuhkan keterpauan program. (Nasir, dkk 2008).

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi kebutuhan minimal ekonomi dalam hidupnya dan dalam arti populer kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Menurut World Bank (2004), penyebab-penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan asset untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang menunjang kehidupan mereka. Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan

keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya orang yang termasuk pada kategori miskin yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta rendahnya pendidikan dan kesehatan yang mereka miliki. Dalam mengatasi kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan permasalahan lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi.

Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning (2001), bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "capability deprivation" di mana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan.

Menurut laporan *Institut National Etudes Demographiques*, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Namun Indonesia belum dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pada negara tersebut. Masih banyak sumberdaya alam yang terbuang sia-sia begitu saja atau bahkan orang asing yang lebih dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia karna kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan mengerti teknologi untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada tersebut. Padahal jika Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya yang ada maka Indonesia dapat

menjadi negara yang maju. Karena hal tersebutlah yang akhirnya menjadikan Indonesia termasuk negara yang miskin.

Menurut ukuran jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin di Indonesia dari periode tahun 2014-2015 (table 1.1) yang terjadi juga mengalami kecenderungan naik dimulai dari tahun 2014 dengan jumlah presentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 10,96 persen dan sampai tahun 2015 menjadi 11,13 persen. Keberhasilan Indonesia dalam mengurangi kemiskinan belum lah memperlihatkan hasil yang signifikan. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang cenderung tetap meningkat.

Tabel 1.1

Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2014-2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Presentasi Penduduk Miskin (%)			Garis Kemiskinan (rupiah)	
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + desa	Kota	Desa
2014	10.36	17.37	27.73	8.16	13.76	10.96	326 853	296 681
2015	10.62	17.89	28.51	8.22	14.09	11.13	356 378	333 034

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik)

Dari hasil perhitungan di atas yang memperlihatkan kemiskinan yang ada di Indonesia semakin meningkat, maka pemerintah harus lebih berusaha dalam

penanggulangan masalah kemiskinan yang ada secara berkelanjutan guna menekan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Pada September 2014, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,73 juta orang (10,96 persen), berkurang sebesar 0,55 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang sebesar 28,28 juta orang (11,25 persen), dan berkurang sebesar 0,87 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 yang sebesar 28,60 juta orang (11,46 persen). Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen).

Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi di Jawa yang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan kedua tertinggi setelah DIY Yogyakarta yaitu 13,45 dimana pada tahun 2014 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mencapai angka 13,58 dan di tahun 2015 sebesar 13,32. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2015 mencapai 4,577 juta orang, naik sekitar 15,21 ribu orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2014 yang sebesar 4,562 juta orang. Namun secara persentase penduduk miskin menurun menjadi 13,32 persen (tabel 2.1) .

Table 1.2
Tingkat Kemiskinan Di Pulau Jawa 2014-2015
(Persen)

Provinsi	2014	2015	Rata-rata
DKI Jakarta	4.09	3.61	3.85
Jawa Barat	9.18	9.57	9.375
Jawa Tengah	13.58	13.32	13.45
DI Yogyakarta	14.55	13.16	13.855
Jawa Timur	12.28	12.28	12.28
Banten	5.51	5.75	5.63

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik)

Meski lebih dari 20 ribu penduduk terangkat dari garis kemiskinan sejak awal tahun, Jawa Tengah tetap memiliki jumlah penduduk miskin terbesar kedua di pulau Jawa, yakni 4.505.780 juta. Batas pendapatan untuk kategori miskin di provinsi ini berkisar 310 ribu Rupiah per bulan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya tenaga yang handal dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara optimal. Padahal Jawa Tengah merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus cepat mengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Masalah kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi karena masih ada nya ketimpangan ekonomi antar wilayah yang ada di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena banyak faktor terutama masalah makro seperti inflasi, PDRB, pendidikan dan UMK. Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan barang umum secara terus menerus (Boediono, 1989). Bila dikaitkan dengan kemiskinan maka ketika inflasi mengalami peningkatan maka akan di barengi dengan naik nya garis kemiskinan bila tidak diikuti oleh peningkatan daya beli atau peningkatan pendapatan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah maka akan mendorong meningkat nya jumlah penduduk miskin.

Dalam penelitian Profesor Kuznet dimana salah satu karakter pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output perkapita (Tondaro,2006). Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud disini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Tingginya output perkapita dan perubahan pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Perumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan tingkat kemiskinan yang ada saat ini. Dengan ada nya peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kemudian dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor yang mendorong tinggi rendah nya tingkat kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia

dapat dilihat dari pendidikan yang mereka miliki. Rendahnya pendidikan masyarakat akan berdampak kepada rendahnya keterampilan yang dimiliki yang kemudian dapat menurunkan produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah akan berdampak kepada rendahnya pendapatan. Sehingga ketika pendapatan masyarakat rendah akan menyebabkan rendahnya kualitas hidup masyarakat dan mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan (Saputra, 2011).

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu upah minimum. Upah minimum yaitu standar upah yang digunakan oleh perusahaan dalam memberikan gaji kepada pekerjanya yang dimana upah minimum ditetapkan oleh pemerintah, namun dengan berbedanya kondisi di tiap wilayah menyebabkan perbedaan upah minimum pada tiap-tiap daerah. Ketika upah minimum di suatu wilayah rendah maka pendapatan masyarakat rendah dan hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya kemiskinan. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota agar dapat diketahui faktor-faktor yang diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini

mengambil judul penelitian **“FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH (TAHUN 2011-2016)**

1.2 Batasan Masalah

Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2011-2016

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu

1. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap kemiskinan di Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap kemiskinan di Jawa Tengah?
5. Bagaimana pengaruh inflasi, Produk domestik regional bruto (PDRB), pendidikan dan upah minimum secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Jawa Tengah?

1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
2. Mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

3. Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
4. Mengetahui pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
5. Mengetahui pengaruh inflasi, produk domestik regional bruto (PDRB), pendidikan, upah minimum secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi ilmu ekonomi pengetahuan khususnya ilmu ekonomi pembangunan.
2. Bagi pemerintah Jawa Tengah
Penulisan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
3. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pengambil keputusan dalam perencanaan dan strategi yang tepat dalam rangka pengembalian sektor pertanian.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua referensi penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya guna menunjang penulisan penelitian ini. Sedangkan landasan teori merupakan konsep tentang variable-variable yang di gunakan dalam penelitian ini

BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dalam memperoleh data yang di gunakan untuk penelitian serta berkaitan dengan prosedur penelitian yang dimana juga menjelaskan tentang alat-alat yang di gunakan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil yang telah di dapatkan dari penelitian yang telah di laksanakan.

BAB V : Kesimpulan dan Implikasi

Pada bab ini akan ditarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan implikasi adalah sebagai hasil dari kesimpulan. Selain itu juga berisi mengenai saran-saran yang

di berikan kepada pihak-pihak yang terkait jika terdapat masalah dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Busra (2011), meneliti analisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Aceh. Dalam penelitian ini, untuk melihat faktor yang mempengaruhi kemiskinan digunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan dan variabel tingkat pengangguran terhadap Fixee Effect Model (FEM). Penelitian ini menggunakan pendekatan Fixee Effect Model (FEM) dikarenakan N besar dan T kecil selain itu bahwa unit cross-section yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan fixed effect. Hasil penelitian ini adalah variable PDRB dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pendidikan berpengaruh tetapi tidak signifikan dan secara bersama-sama ketiga variable berpengaruh secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Aceh.

Mustika (2011), meneliti pengaruh PDB dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Indonesia Periodee 1990-2008. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tabulasi untuk menggambarkan perkembangan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan menghubungkannya dengan perkembangan besaran makro lainnya secara kuantitatif serta analisis regresi untuk mengetahui sejauh mana pengaruh jumlah penduduk, dan produk domestik bruto terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan variable yang mempengaruhi kemiskinan yaitu variable jumlah penduduk, dan

Produk domestik bruto. Hasil penelitian ini adalah variable PDB dan variable jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Rusdarti dan Sebayang (2013), meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. Data yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder yaitu jumlah penduduk miskin periode 2000-2004, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar nilai konstan, jumlah penduduk, pengangguran, dan data keuangan daerah (APBD) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan model regresi. Pada Pembahasan mencakup 2 aspek temuan yaitu: Pertama, pendekatan grafis sebagai pola fenomena kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Kedua, mengestimasi hubungan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan seperti Produk Domestik Bruto (PDRB), Belanja publik, dan pengangguran pada tahun 2007 dan temuan kedua teknik yang digunakan adalah pendekatan model regresi berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan, produk domestik regional bruto (PDRB), pengangguran, dan belanja publik terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini adalah PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah, sementara itu belanja berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Hasil ini menunjukkan masih dominannya belanja operasional/konsumsi pemerintah dengan orientasi belanja pegawai yang semakin tinggi menyebabkan rendahnya prioritas pada pelayanan

publik. Perbedaan kota dengan kabupaten berpengaruh signifikan tingkat kemiskinan di provinsi jawa tengah.

Putri (2013), meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi data IPM, PDRB per kapita, dan belanja publik yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada periode tahun 2008-2012 dan analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia (IPM) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi jawa timur, PDRB per kapita mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi jawa timur, belanja publik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi jawa timur.

Nizar. Et-al. (2013) meneliti pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data sekunder berupa data time series pada tahun 1980-2010. Pada penelitian tersebut yang menggunakan variable investasi asing langsung (FDI), investasi pemerintah, tenaga kerja, PDB, dan kemiskinan, bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan secara langsung, selanjutnya menganalisis pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana pengaruh estimasi pertumbuhan ekonomi hasil dari analisis variable investasi dan tenaga kerja terhadap tingkat

kemiskinan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (PDB) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, FDI, investasi pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, FDI, Investasi pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Indonesia.

Barika (2013) meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatra. Variable independent yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran dan Inflasi sedangkan variable dependent yang di gunakan adalah tingkat kemiskinan. Dimana studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi sumatra. Hasil penelitian ini adalah Pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Sumatera. Hal dapat mengindikasikan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi relative kurang baik, yang antara lain disebabkan sebagian besar pertumbuhan ekonomi tersebut lebih ditopang oleh sektor konsumsi. Selain itu, kurang maksimalnya aspek pemerataan pendapatan dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga peningkatan pendapatan cenderung dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat saja. Selain itu pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Sumatera. Pengeluaran

pemerintah mempunyai pengaruh negative, sementara, variable tingkat pengangguran terbukti berpengaruh secara positif.

Cholili (2014) meneliti pengaruh pengangguran, produk domestik regional bruto (PDRB) dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data sekunder berupa gabungan dari time series dan cross section dari tahun 2008-2012 dari 33 provinsi di Indonesia. . Pada penelitian tersebut variable independent yang di gunakan yaitu produk domestik regional bruto (PDRB), indeks pembangunan manusia (IPM), dan pengangguran sedangkan variable dependent yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu kemiskinan. Hasil dari penelitian tersebut adalah PDRB memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan, IPM mempunyai pengaruh negatif dan signifikan sedangkan pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Yusri (2016) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data sekunder berupa gabungan dari time series dan cross section dari tahun 2013-2014 dari 35 kabupaten di Jawa Tengah. Pada penelitian tersebut variable independent yang di gunakan yaitu indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, dan upah minimum sedangkan variable dependent yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, dan upah minimum

terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian tersebut adalah indeks pembangunan manusia dan upah minum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Zuhdiaty (2017) meneliti Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (studi Kasus Pada 33 Provinsi). Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan data sekunder yang meneliti variable kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2011-2015 menggunakan analisis regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independent pertumbuhan ekonomi, TPT, dan IPM berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependent kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi, TPT, dan IPM memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan. Diantara ketiga variabel tersebut hanya variabel IPM yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Sementara pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang ada kurang berkualitas sehingga tidak mempengaruhi kemiskinan. Begitu juga dengan pengangguran bahwa tingkat TPT juga tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, hal ini menandakan bahwa mereka yang menganggur belum tentu memiliki pendapatan yang rendah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kemiskinan

2.2.1.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan primer nya guna mengembangkan hak yang bermartabat dalam hidup nya. Definisi lain kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang berada dibawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi dimana individu mengalami penurunan kualitas hidup dibandingkan dengan individu yang lain nya yang ada dalam masyarakat.

2.2.1.2 Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan dapat disebabkan alat pemenuh kebutuhan dasar yang langka, atau pun kurang nya sarana dan pra sarana yang memadai dalam menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemiskinan juga dapat terjadi akibat ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang sedikit dan kualitas nya yang rendah di bandingkan dengan masyarakat yang lebih kaya. Rendah nya pendidikan juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadi nya kemiskinan yang kemudian akan berakibat pada rendah nya sumber daya manusia, rendahnya sumber daya manusia dapat berdampak juga pada rendah nya upah yang akan diterima. Kemudia kemiskinan juga dapat terjadi juga akibat lingkaran kemiskinan yang terus menerus berputar dan tidak ada ujung nya.

2.2.1.3 Ciri-Ciri Kemiskinan

1. Kekurangan fisik yang menghambat untuk dapat berusaha
2. Tidak adanya jaminan untuk menunjang masa depan karena tidak adanya biaya untuk memenuhi kebutuhan
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan primer dasar
4. Tidak adanya sarana dan prasarana dalam menunjang masa depan
5. Kegiatan sosial masyarakat yang terbatas.
6. Lapangan usaha dan mata pencaharian yang tidak memadai
7. Sumber daya manusia dan sumber daya alam yang rendah.
8. Kehidupan sosial yang buruk.

2.2.1.4 Kemiskinan dibagi menjadi empat bentuk, yaitu :

1. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang terjadi pada seseorang akibat dari kurangnya pemanfaatan sumber daya alam disekitar mereka yang sebenarnya dapat mereka manfaatkan sebagai sumber pendapatan yang disebabkan karena perbedaan peran dalam masyarakat.

2. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan yang terjadi akibat dari sikap seseorang yang disebabkan oleh kultur budaya, seperti tidak adanya kemauan dalam memperbaiki kualitas hidup, bermalas-malasan dan

kurangnya kreatifitas meski ada nya bantuan peltihan untuk mengasah kreatifitas.

3. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang terjadi dimana kondisi pendapatan berada di bawah garis kemiskinan atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup nya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan bermasyarakat.

4. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan ini terjadi karena tidak merata nya ekonomi yang kemudian mengakibatkan ketimpangan di beberapa daerah yang kemudian dapat menghambat pembangunan.

Kemiskinan dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan ini berkaitan dengan sarana dan prasarana umum yang kurang memadai serta langka nya sumber daya alam dan kurang subur nya lahan disekitar.

2. Kemiskinan Buatan

Kemajuan teknologi dalam sarana dan prasarana yang tidak dapat di manfaat kan secara optimal oleh masyarakat yang menyebabkan ketertinggalan pengetahuan yang kemudian berdampak kepada ketertinggalan dalam kehidupan sehari-hari.

2.2.2 Inflasi

2.2.2.1 Pengertian Inflasi

Inflasi adalah ketidak seimbangan arus barang dan uang dalam suatu perekonomian yang mengakibatkan kenaikan harga barang (kebutuhan masyarakat) dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus-menerus (berulang-ulang). Kenaikan harga dapat terjadi karena permintaan lebih besar dibandingkan dengan penawaran. ketersediaan barang atau jasa di pasar bisa saja tetap atau bahkan menurun. Dengan demikian inflasi terjadi hanya ketika harga barang mengalami kenaikan secara terus menerus.

Dalam ekonomi terdapat 3 macam jenis teori inflasi di antaranya:

a. Teori Kuantitas

Teori ini menjelaskan bahwa inflasi hanya akan terjadi bila jumlah uang yang beredar semakin meningkat saja tanpa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Berdasarkan teori kuantitas ini, terdapat 2 faktor yang menyebabkan inflasi yaitu :

1. Jumlah uang yang beredar

Inflasi dapat meningkat apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin banyak dan semakin besar jumlah uang yang beredar. Oleh sebab itu, ketika pemerintah akan mengeluarkan uang baru harus mempertimbangkan masalah inflasi ini karena apabila uang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah terlalu banyak akan terhadap ketidak stabilan perekonomian.

2. Perkiraan masyarakat bahwa harga-harga akan naik

Ketika masyarakat berfikir bahwa harga barang akan mengalami kenaikan maka masyarakat cenderung membelikan uangnya dengan barang.

b. Teori Keynes

Teori ini terjadi apabila permintaan masyarakat lebih besar dibandingkan dengan uang yang tersedia. Menurut Keynes inflasi terjadi disebabkan karena keinginan hidup masyarakat yang melebihi batas kemampuan ekonomi yang mereka miliki. Teori ini juga fokus pada persaingan antar masyarakat dapat menyebabkan permintaan agregat yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah barang yang tersedia akan mengakibatkan harga barang semakin naik.

c. Teori Strukturalis

Teori ini juga sering disebut sebagai teori infalsi jangka panjang karena teori ini mengamati penyebab terjadinya inflasi yang berasal dari struktur ekonomi terutama bagi penyedia bahan makanan dan barang ekspor. Teori ini menjelaskan ketika bertambahnya barang tidak seimbang dengan pertumbuhan kebutuhan akan berakibat pada naiknya harga bahan pangan. Apabila harga pangan semakin meningkat maka akan mengakibatkan kenaikan harga barang secara merata dan terjadilah infalsi. Infalsi seperti ini memerlukan penanganan yang cukup serius karena bukan hanya pengurangan jumlah uang yang

beredar, tetapi harus dengan meningkatkan produktivitas dan pembangunan sektor pangan dan barang ekspor.

Ada beberapa jenis-jenis Inflasi antara lain :

1. Inflasi berdasarkan Sifatnya

Dalam infalsi ini dibagi menjadi 4 macam berdasarkan sifatnya :

- a. Infalsi rendah adalah infasi yang mempunyai nilai kurang dari 10% per tahun nya
- b. Infalsi menengah adalah infalsi dengan nilai antara 10-30% per tahunnya
- c. Infalsi berat adalah infalsi yang besarnya 30-100% pertahun.
- d. Infalsi tinggi (hiper inflasi) adalah inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga barang yang cukup tinggi hingga mencapai 4 digit angka (diatas 100%)

2. Berdasarkan penyebab nya

Dalam inflasi ini di bagi menjadi 3 yaitu :

- a. Tarik permintaan (*Demand pull inflation*).
- b. Desakan biaya (*Cost push inflation*).
- c. Inflasi campuran (*Bottle neck inflation*).

3. Inflasi Berdasarkan Asalnya

Jenis inflasi ini terbagi menjadi 2 yaitu

- a. Domestic inflation.
- b. Imported inflation

2.2.2.2 Faktor-faktor yang menyebabkan inflasi

1. Kenaikan Permintaan Agregate (*Demand pullinflation*).

Ketika permintaan lebih besar dibandingkan dengan penawaran yang kemudian akan menyebabkan naiknya harga.

2. Kenaikan biaya produksi (*cost push inflation*)

Inflasi ini terjadi karena harga faktor produksi bahan baku dan alat yang naik maka akan menyebabkan naiknya biaya produksi.

2.2.2.3 Dampak Inflasi

1. Dampak atau akibat dari inflasi terhadap perekonomian suatu negara yaitu:
 - a. Investor semakin berkurang.
 - b. Meningkatkan suku bunga.
 - c. Meningkatkan tingkat spekulatif.
 - d. Kegagalan dalam pembangunan.
 - e. Ekonomi dimasa mendatang tidak pasti.
 - f. Berkurang daya saing produk nasional.
 - g. Neraca pembayaran mengalami defisit.
 - h. Menurun kesejahteraan masyarakat.

2. Dampak inflasi yang akan timbul terhadap masyarakat adalah:

- a. Penghasilan masyarakat tetap.
- b. Kreditur atau debitur.
- c. Kesenjangan distribusi pendapatan semakin meningkat.
- d. Menguntungkan para spekulan.
- e. Mempengaruhi para pelaku ekonomi.

2.2.2.4 Cara Mengatasi Inflasi

Inflasi adalah salah satu masalah yang cukup krusial bagi kestabilan perekonomian suatu negara. Maka jika inflasi tidak segera di atasi dapat menimbulkan masalah-masalah perekonomian di negara tersebut. Untuk menyelesaikan masalah ini perlu ada nya kajian-kajian mengenai hal tersebut. Para ahli menyebutkan bahwa masalah inflasi tidak saja hanya karena peredaran uang dimasyarakat yang tinggi tetapi juga karena ketersediaan barang dan jasa yang ada di masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan infalsi ini ada beberapa kebijakan yang dapat dipakai, yaitu :

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan ini diambil oleh pemerintah dalam bidang keuangan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan jumlah uang yang beredar di masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter sendiri meliputi politik diskonto, kebijakan pasar terbuka, menaikkan cadangan kas, kredit selektif, politik sanering.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan ini berhubungan dengan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara menaikkan tarif pajak, mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah serta melakukan pinjaman pemerintah.

3. Kebijakan Non Moneter

Kebijakan ini yaitu kebijakan yang tidak berhubungan dengan keuangan pemerintah maupun dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat, namun kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan :

1. Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya.
2. Menekan tingkat rupiah.
3. Pengawasan harga dan penetapan nilai maksimum oleh pemerintah.
4. Distribusi secara langsung oleh pemerintah.
5. Jika inflasi sudah parah penanggulangan yang dilakukan dengan pemotongan nilai mata uang.

2.2.2.5 Hubungan antara inflasi dengan kemiskinan

Menurut teori Keynes inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Dengan kata lain proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang dapat disediakan masyarakat sehingga proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi

keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (*inflationary gap*). Krisis moneter yang melanda negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, telah menyebabkan rusaknya sendi-sendi perekonomian nasional. Krisis moneter menyebabkan terjadinya *imported inflation* sebagai akibat dari terdepresiasinya secara tajam nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, yang selanjutnya mengakibatkan tekanan inflasi yang berat bagi Indonesia.

Dan sesuai dengan kurva philip inflasi akan menurunkan tingkat kemiskinan melalui pengurangan jumlah pengangguran. Pada saat inflasi meningkat maka jumlah pengangguran yang ada pun akan berkurang dan apabila inflasi menurun maka pengangguran akan semakin meningkat. Ketika pengangguran menurun maka masyarakat akan mendapatkan pendapatan yang dapat menunjang kehidupan mereka. Saat masyarakat memiliki pendapatan yang baik maka konsumsi masyarakat akan lebih baik dan akan mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan, sehingga hal tersebut akan menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Namun hubungan inflasi dengan pengangguran ini hanya berpengaruh dalam jangka pendek saja.

2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.2.3.1 Pengertian PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan sebagai alat ukur kondisi ekonomi baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan pada suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Terdapat dua cara dalam menghitung PDRB berdasarkan harga yaitu dengan harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku yaitu perhitungan nilai tambahan barang jasa yang di dasarkan atas harga barang dan jasa yang berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu yang di gunakan sebagai tahun dasar.

2.2.3.2 Metode penghitungan

Untuk menghitung PDRB terdapat empat pendekatan, diantaranya yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Kata lain untuk pendekatan ini yaitu pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto (NTB) dengan cara mengurangi nilai out put yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara dari masing nilai produksi bruto tiap sektor ekonomi. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipain oleh unit produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikutsertanya dalam proses produksi.

2. Pendekatan Pendapatan

Pada pendekatan ini, nilai tambah dari kegiatan – kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk sektor Pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha (bunga neto, sewa tanah dan keuntungan) tidak diperhitungkan.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat untuk keperluan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial ; Pembentukan modal; dan ekspor. Mengingat nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik, total pengeluaran dari komponen – komponen di atas harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor yang dimaksud adalah ekspor neto. Penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

4. Metode ini digunakan jika data suatu unit produksi di suatu daerah tidak tersedia. Nilai tambah suatu unit produksi di daerah tersebut dihitung dengan menggunakan data yang telah dialokasikan dari sumber yang tingkatnya lebih tinggi, misalnya data suatu kabupaten diperoleh dari alokasi data Propinsi. Beberapa alokator yang digunakan adalah nilai produksi bruto atau neto, jumlah produksi fisik, tenaga

kerja, penduduk, dan alokator lainnya yang dianggap cocok untuk menghitung nilai suatu unit produksi.

2.2.3.2 Pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat digunakan PDRB untuk alat analisis nya. PDRB sangat lah berpengaruh penting dalam kemiskinan di suatu daerah maupun daerah. Pertumbuhan yang meningkat akan menandakan bahwa suatu negara dapat dikatakan yang maju maupun berkembang, karena pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan sangat berhubungan lurus dan pengaruh nya sangat kuat.

Sadono Sukirno (2000) mengatakan bahawa, pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan ketika kenaikan PDRB tanpa memandang kenaikan itu lebih besar maupun lebih kecil. Namun pertumbuhan ekonomi tidak hanya semata-mata hanya mengenai kenaikan PDRB secara keseluruhan, namun juga bagaimana pendistribusian dana kepada masyarakat dan siapa saja yang telah menerima distribusi dana tersebut. Sehingga ketika PDRB menurun akan berdampak kepada menurun nya kualitas dan konsumsi rumah tangga. Dan ketika pendapatan masyarakat berkurang makan banyak rumah tangga yang menjadi miskin yang berakibat pada perubahan pola makanan pokok nya menjadi bahan pokok yang murah dan dengan jumlah yang berkurang.

2.2.4. Pendidikan

Saat ini Indonesia mewajibkan untuk wajib belajar 9 tahun bahkan hingga 12 tahun. Hal tersebut dikarenakan pendidikan merupakan hal penting dan mendasar. Karena dengan pendidikan yang baik disuatu negara maka diharapkan generasi penerus bangsa tersebut dapat lebih bermanfaat untuk perkembangan negara nya. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki kehidupan bangsa salah satu aspek yang dapat di perbaiki yaitu dari aspek pendidikan.

Pada dasarnya pengertian pendidikan UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003) adalah usaha sadar dalam mengembangkan keterampilan peserta didik sehingga potensi yang mereka miliki dapat lebih terlihat dan dapat mengerti nilai-nilai sosial dan keagamaan dalam masyarakat melalui kegiatan ajar-mengajar.

2.2.4.1 Pengertian Pendidikan

Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita- cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu

sendiri [memotivasi diri](#) kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

2.2.4.2 Hubungan Pendidikan dengan Kemiskinan

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang kompleks dalam masalah kemiskinan. Biasanya suatu negara yang memiliki pendidikan yang rendah juga memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Pendidikan yang rendah menjadikan sumber daya manusia yang ada juga menjadi rendah. Ketika sumber daya manusia rendah maka pendapatan masyarakat juga menjadi rendah, hal tersebut dikarenakan pada beberapa kriteria pekerjaan mengharuskan seseorang memiliki pendidikan yang baik untuk mendapatkan pekerjaan. Pendidikan dapat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mereka (Arsyad (2004)).

Dengan pendidikan yang baik, masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat mereka jadikan bekal dan dapat mereka gunakan untuk mencari pekerjaan yang baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka (Ustama (2009)). Dengan demikian, pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan yang kemudian masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan.

2.2.5 Upah Minimum

2.2.5.1 Pengertian Upah Minimum

Dalam pasar tenaga kerja upah adalah hal penting yang harus ditetapkan oleh perusahaan untuk dibayarkan kepada karyawannya. Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah yang dapat dibayarkan kepada tenaga kerja (Mankiw, 2006). Upah minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok dan sudah termasuk tunjangan-tunjangan tetap. Yang dimaksud tunjangan tetap yaitu jumlah upah yang dibayarkan perusahaan secara rutin setiap bulan yang tidak ada kaitannya dengan pencapaian prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum yaitu untuk menciptakan upah yang layak bagi para pencari kerja. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya upah yaitu diantaranya :

1. Penawaran dan Permintaan tenaga kerja

Ketika pekerjaan yang memiliki kriteria tertentu yang diharuskan memiliki keterampilan tinggi dan tenaga kerja yang dibutuhkan langka maka upah akan tinggi namun apabila penawaran kerja yang melimpah maka upah yang ditawarkan pun akan rendah.

2. Organisasi Buruh

Organisasi buruh yang kuat akan meningkatkan upah namun ketika organisasi buruh lemah maka upah pun akan rendah

3. Kemampuan dan Membayar

Upah yang akan di bayarkan kepada tenaga kerja biasa nya tergantung kepada perusahaan yang akan memberikan upah kepada tenaga kerja tersebut. Karena menurut perusahaan memberi gaji tenaga kerja termasuk dalam biaya produksi, maka perusahaan akan memperkecil biaya produksi dengan menurunkan gaji karyawan.

4. Produktivitas Kerja

Upah adalah imbalan yang di berikan oleh perusahaan. Maka ketika tenaga kerja memiliki prestasi yang baik kemungkinan besar akan mendapat kan upah yang tinggi pula. Prestasi kerja dinyatakan sebagai produktivitas kerja.

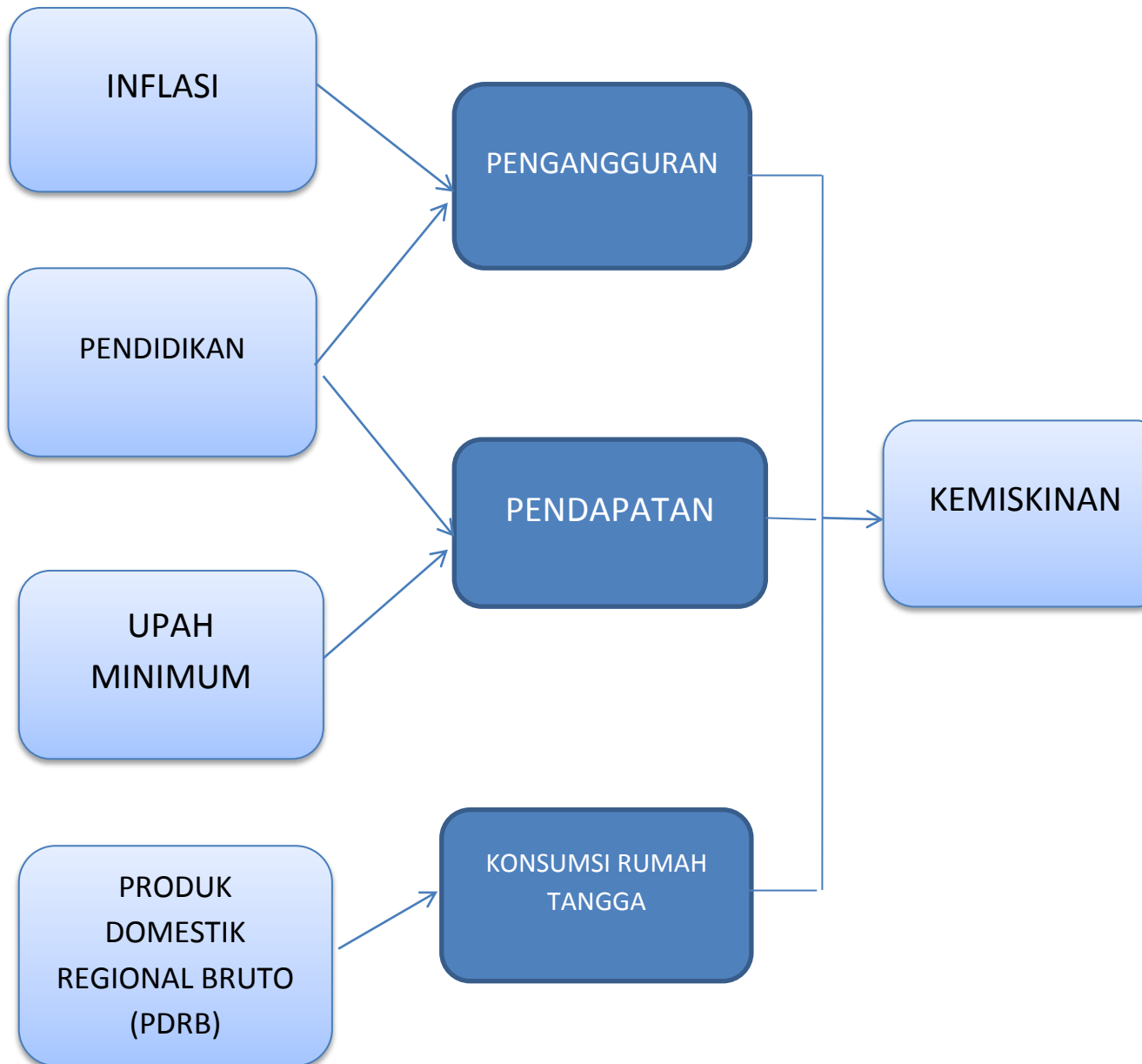
5. Pemerintah

Pemerintah adalah kunci utama dari kebijakan-kebijakan yang ada di tetapkan di masyarakat termasuk dengan upah minimum.

2.2.5.2 Hubungan Upah Minimum dengan Kemiskinan

Ketika upah minimum dinaikan maka pendapatann tenaga kerja meningkat yang kemudian kehidupan masyarakat pun akan lebih sejahtera karena mereka dapat memperbaiki konsumsi mereka dan akan bebas dari kemiskinan. Namun ketika upah minimum naik maka perusahaan tidak dapat menampung pekerja yang banyak, maka hal tersebut dapat meningkat kan pengangguran. Baik buruk nya dampak upah minimum akan berkaitan dengan tingkat kemiskinan.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Hipotesis

adalah jawaban sementara dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan masih harus dicari kebenarannya. Maka jawaban sementara dari penelitian ini yaitu :

- Variable Inflasi diduga sementara berpengaruh negatif terhadap tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Variable Produk Domestik Regional Bruto diduga sementara berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Variable Pendidikan diduga sementara berpengaruh negatif terhadap peningkatan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Variable upah minimum diduga sementara berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Diduga sementara variable pengangguran, produk domestik regional bruto (PDRB), pendidikan, upah minimum secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan data *cross section* dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan *times series* dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, penulis mengumpulkan data dari data-data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dalam berbagai tahun publikasi.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian yang digunakan ada 4 variabel independen (bebas) dan variabel terikat (dependen). Variabel independen dalam penelitian ini adalah inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan. Untuk memperjelas pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan definisi operasional variabel, yaitu sebagai berikut :

1. Kemiskinan

kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidak nyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan

keadilan, terancamnya posisi tawar (bargaining) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang lebih menekankan pada “kualitas hidup” yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan. Data kemiskinan yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2016 (Dalam Persen).

2. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ; konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Data yang dipakai dalam penelitian adalah inflasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2016 (Dalam Persen).

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan pendapatan daerah berupa nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga pada tahun tertentu yang digunakan sebagai acuan tahun dasar, baik saat menghitung atau menilai biaya, produksi antara maupun komponen nilai tambah masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011-2016 (Dalam Rupiah).

4. Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran yang di turunkan dari generasi ke generasi guna memberikan pengetahuan, keterampilan dan mengajarkan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Data yang dipakai dalam penelitian adalah adalah Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2016 (Dalam Persen)

5. Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Upah Minimum Kabupaten yaitu upah bulanan yang terdiri dari upah pokok dan sudah termasuk tunjangan-tunjangan tetap. Yang di maksud tunjangan tetap yaitu jumlah upah yang di bayarkan perusahaan secara rutin setiap bulan yang tidak ada kaitan nya dengan pencapaian prestasi tertentu.. Data yang dipakai dalam penelitian adalah Upah Minimum Kabupaten dalam metode baru Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2016 (Dalam Rupiah).

3.3 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel (*pooled data*) sebagai alat pengolahan data serta dalam analisisnya menggunakan program *Eviews 8*. Data panel merupakan data gabungan antara data (*time series*) dan (*cross section*).

$$POV = \beta_0 + \beta_1 INF + \beta_2 PDRB + \beta_3 Pendidikan + \beta_4 UMK + \mu$$

Dimana:

POV = Persentase Penduduk Miskin (Satuan Persen)

INF = Inflasi (Satuan Persen)

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan (Satuan
Rupiah)

Pendidikan = Angka Partisipasi Sekolah (Satuan Persen)

UMK = Upah Minimum Kabupaten (Satuan Rupiah)

B0 =Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Koefisien regresiberganda

μ = Variabel pengganggu

3.4 Estimasi Model Regresi Data Panel

Dalam estimasi model regresi data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu :

3.4.1 *Common Effect Model*

Metode pendekatan ini tidak memperhatikan waktu maupun individu. Diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu (Widarjono, 2009). Pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* tanpa memperhatikan waktu maupun individu sehingga sama halnya dengan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

3.4.2 Fixed Effect Model

Dalam metode ini menggunakan variabel Dummy atau fixed effect dan dikenal juga dengan Covariance model. Metode fixed effect estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (no weighted) atau Least Square Dummy Variabel (LSDV) dan dengan pembobot (cross section weight) atau General Least Square (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotsn adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit cross section. Penggunaan model ini tepat untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasi data.

3.4.3 Random Effect Model

Dalam model fixed effect memasukkan dummy membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) sehingga pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat digunakan variabel gangguan (error term) yang dikenal dengan random effect. Model ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.(Agus Widarjono,2009).

3.5 Penentu Model Estimasi

Untuk memilih model yang tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu :

3.5.1 *Chow test* (Uji Chow)

Uji chow merupakan pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah :

H0 : Memilih model *Common Effect Model* atau *pooled OLS* jika nilai probabilitas F statistiknya tidak signifikan pada $\alpha 5\%$.

H1 : Memilih model *Fixed Effect Model*, jika nilai probabilitas F statistiknya signifikan pada $\alpha 5\%$.

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar ($>$) dari tabel maka H0 ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *fixed Effect Model*. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil ($<$) dari F tabel maka H0 diterima dan model yang digunakan adalah *Common Effect Model* (Agus Widarjono, 2009).

3.5.2 Uji Hausman

Uji Hausman dapat dilakukan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut :

H0 : Memilih model *Random Effect*, jika nilai Chi-squarenya tidak signifikan pada $\alpha 5\%$.

H1 : Memilih model *Fixed Effect*, jika nilai Chi-squarenya signifikan pada $\alpha 5\%$.

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi *statistic Chi square* dengan *degree of freedom* sebanyak n , dimana n adalah jumlah variabel independen. Jika nilai *statistic Hausman* lebih besar dari nilai kritisnya maka H0 ditolak dan model yang tepat adalah model *Fixed Effect* sedangkan sebaliknya bila nilai *statistic Hausman* lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah *Random Effect*.

3.6 Uji statistik

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2), Uji Koefisien Regresi secara bersama-sama (Uji F), dan Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t).

3.6.1 Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen). Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.2 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Imam Ghozali (2002) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai (R²) adalah antara nol dan satu. Nilai (R²) yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperkirakan variabel dependen.

3.6.3 Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji *statistic t* pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan. Menurut Kuncoro (2011) hipotesis pengujian *t-statistic* adalah :

H₀: Secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H1: Secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika probabilitas $t_{hitung} > 0.05$ maka menerima atau menolak H1, sebaliknya jika probabilitas $t_{hitung} < 0.05$ maka HO menolak atau menerima H1. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% (Widarjono,2009).

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Diskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang di gunakan merupakan gabungan dari time series pada tahun 2010-2016 dan data cross section 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah yang di peroleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasi sumber lain. Berdasarkan data tersebut di peroleh 210 observasi (N).

Variable yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu variable independent yang terdiri dari inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Untuk mengolah data-data tersebut digunakan alat bantu Eviews 8 sesuai regresi yang di pilih.

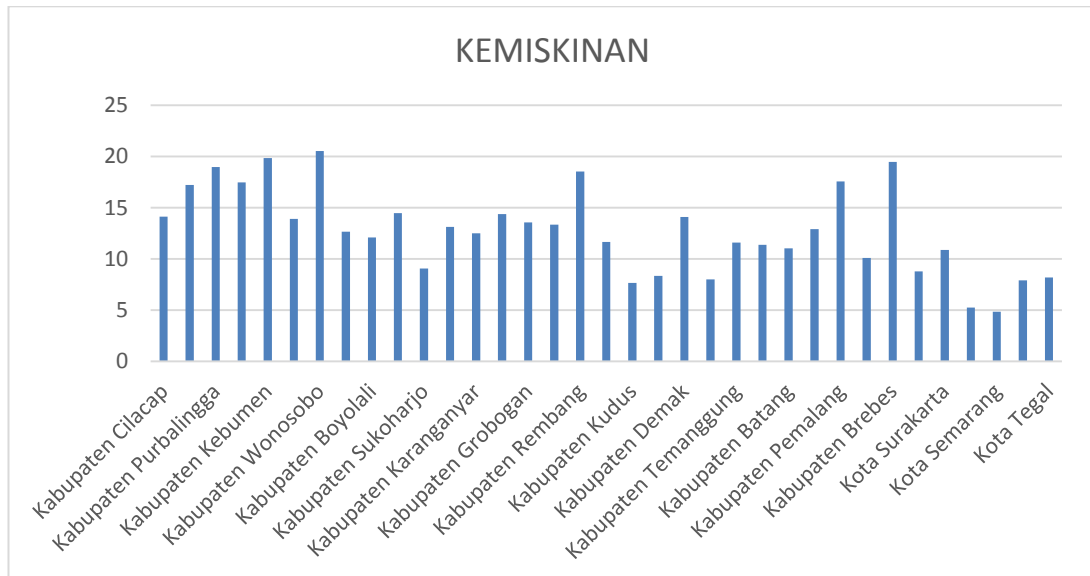
4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.2.1 Kemiskinan (POV)

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Data kemiskinan yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 (Dalam Persen)

Grafik 4.1

Penduduk Miskin Kabupaten Kota di Jawa Tengah (Dalam Persen)



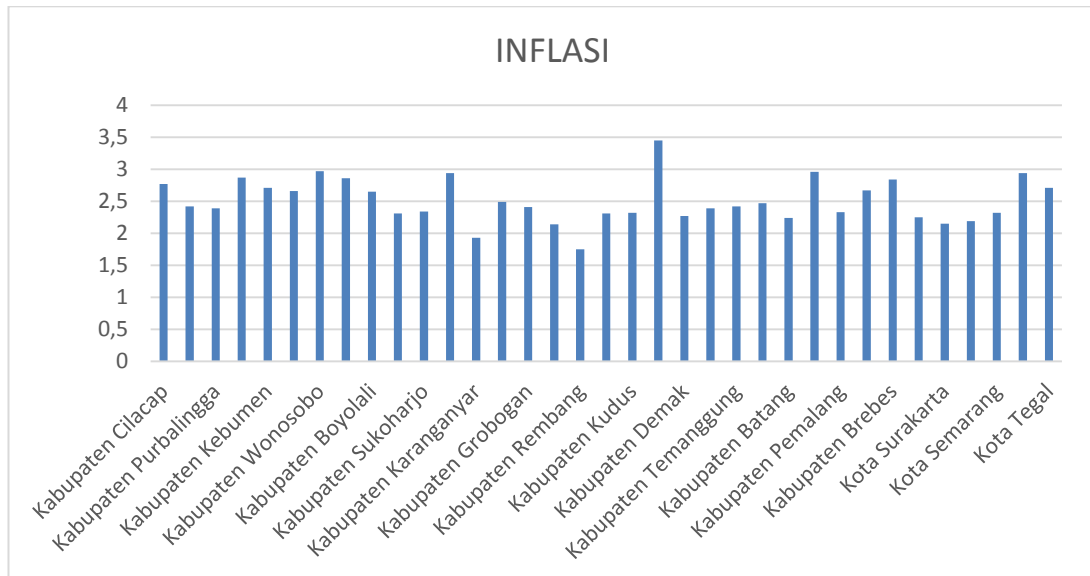
Dari grafik kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2016 menunjukkan kemiskinan tertinggi terdapat di daerah kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 20,53% dan kemiskinan terendah berada di daerah kota Semarang yaitu sebesar 4,85%

4.2.2 Inflasi (INF)

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ; konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Data yang dipakai dalam penelitian adalah inflasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 (Dalam Persen).

Grafik 4.2

Inflasi Kabupaten Kota di Jawa Tengah tahun 2016 (Dalam Persen)



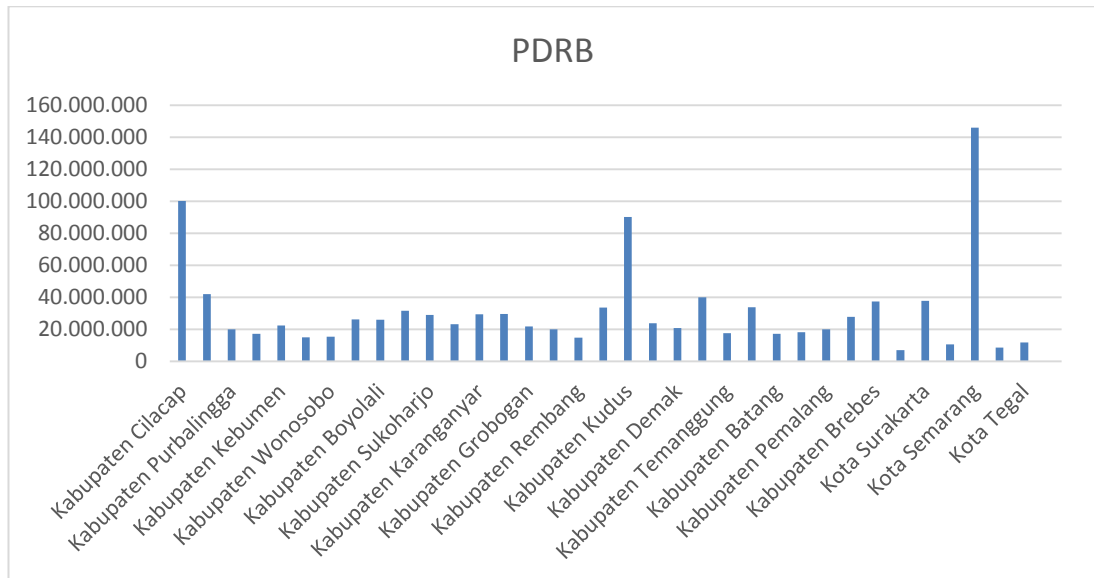
Dari grafik inflasi di atas kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2016 menunjukkan inflasi tertinggi terdapat di daerah kabupaten Jepara yaitu sebesar 3,45% dan inflasi terendah berada di daerah kabupaten rembang yaitu sebesar 1,75%

4.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan pendapatan daerah berupa nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga pada tahun tertentu yang digunakan sebagai acuan tahun dasar, baik saat menghitung atau menilai biaya, produksi antara maupun komponen nilai tambah masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2016 (Dalam Rupiah)

Grafik 4.3

PDRB Kabupaten Kota di Jawa Tengah (Dalam Juta)

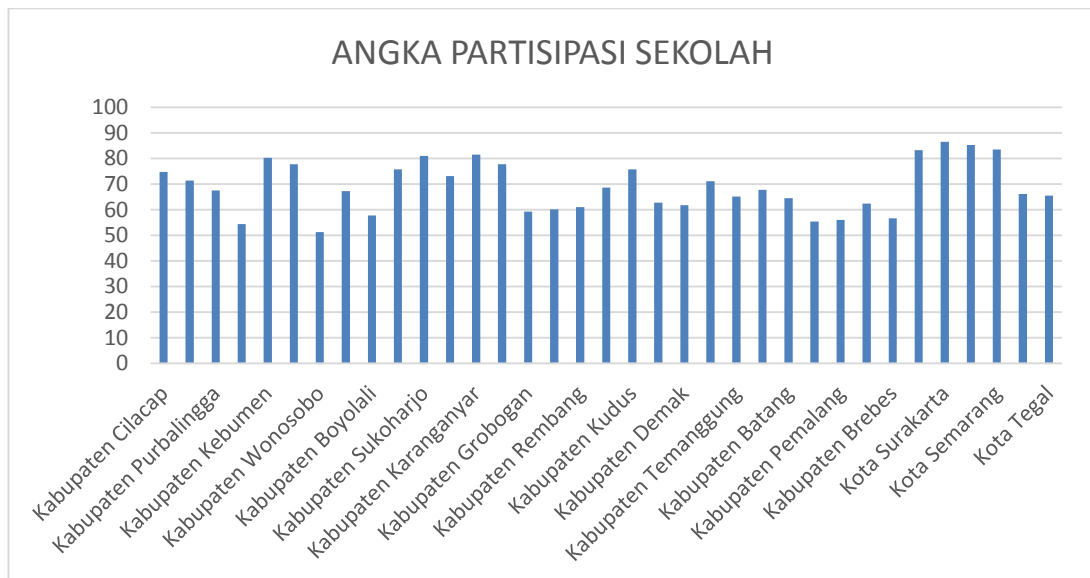


Dari grafik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di atas kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2016 menunjukkan PDRB tertinggi terdapat di daerah kota Semarang yaitu sebesar Rp 145.993.676 (juta) dan PDRB terendah berada di daerah kabupaten rembang yaitu sebesar Rp 7.015.380 (juta)

4.2.4 Pendidikan

Pendidikan adalah proses belajar guna menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar potensi tersebut dalam lebih berkembang serta mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial yang ada lama masyarakat. Data yang dipakai dalam penelitian adalah jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 (Dalam Persen)

Grafik 4.4
Angka Partisipasi Sekolah (Dalam Persen)



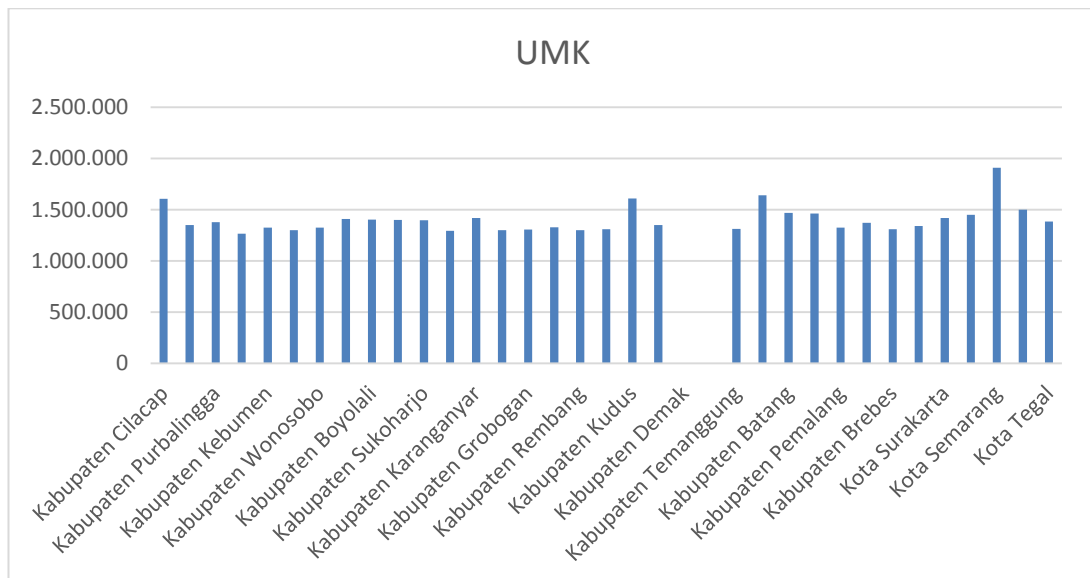
Dari grafik angka partisipasi sekolah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2016 di atas menunjukkan angka partisipasi sekolah tertinggi terdapat di daerah kota surakarta yaitu sebesar 86,48% dan angka partisipasi sekolah terendah berada di daerah kabupaten wonosobo yaitu sebesar 51,22%

4.2.5 Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah standar gaji yang di pakai oleh pengusaha yang di gunakan untuk memberikan upah ke pada para pegawai nya didalam lingkungan pekerjaan tersebut. Data yang dipakai dalam penelitian adalah Indeks Pembangunan Manusia dalam metode baru Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 (Dalam Rupiah).

Grafik 4.5

Data UMK (Dalam Rupiah)



Dari grafik upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2016 di atas menunjukkan angka upah minum tertinggi terdapat di daerah kota semarang yaitu sebesar Rp 1.909.000 dan angka upah minimum terendah berada di daerah kabupaten banjarnegara yaitu sebesar Rp 1.265.000

4.3 Hasil dan Analisis Data

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil-hasil pengujian dan hasilakhir estimasi. Pengujian yang dilakukan antara lain penaksiran model penelitian, pembahasan hasil estimasi, uji statistik, uji hipotesis, dan analisis Ekonomi.

4.3.1 Pemilihan Model Regresi

Dalam model regresi data panel harus dilakukan pengujian yang di gunakan untuk memilih model yang paling tepat yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Pengujian yang di lakukan pada regresi data panel dapat di lakukan dengan tiga alternatif metode yaitu metode common

effect models (CEM), fixed effect models (FEM), random effect models (REM).

4.3.1.1 Chow Test (Uji F-Statistik)

Chow test di lakukan untuk mengetahui model mana yang lebih tepat untuk di gunakan antara model common effect atau fixed effect dengan uji hipotesis sebagai berikut :

Untuk melakukan uji pemilihan antara model Common effect atau model Fixed Effect dapat di lakukan dengan melihat probabilitas apabila signifikan ($\leq 5\%$) maka model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Sedangkan apabila probabilitas tidak signifikan ($\geq 5\%$) maka model yang di gunakan adalah Common Effect Model (CEM).

Tabel 4.1

Chow Test (Uji F-statistik)

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	300.560650	(34,171)	0.0000
Cross-section Chi-square	862.457716	34	0.0000

Sumber : data diolah Eviews 8, 2018

Nilai distribusi Chi-square dari perhitungan menggunakan Eviews 8 adalah sebesar 862.457716 dengan probabilitas 0.000 (kurang dari 5%), sehingga model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

4.3.1.2 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui model yang baik antara fixed effect model (FEM) dan random effect model (REM). Dalam uji ini dapat dilihat apabila nilai probabilitas ($\leq 5\%$) maka model yang baik untuk digunakan yaitu fixed effect model (FEM). Namun apabila probabilitas ($\geq 5\%$), maka model yang digunakan yaitu random effect model (REM).

Tabel 4.2

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.192365	4	0.0001

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Chi-square sebesar 0.0001 yang artinya lebih kecil dari α 0.05 ($0.0001 < 0.05$), maka dapat dilihat bahwa model yang baik untuk digunakan adalah fixed effect model (FEM). Dengan demikian berdasarkan uji Hausman dapat disimpulkan bahwa model fixed effect lah yang

paling tepat untuk di gunakan dalam menganalisis tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Berdasarkan dua uji yang sudah di lakukan maka disimpulkan bahwa model terbaik yang di gunakan dalam pnelitian ini yaitu fixed effect model (FEM).

4.3.2 Hasil Pengujian Statistik

Berdasarkan dua uji yang sudah di lakukan yaitu uji chow dan uji hausman, kedua nya menunjukan bahwa model fixed effect lah yang terbaik. Maka dalam penelitian ini di gunakan model fixed effect dalam mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah.

Tabel 4.3

Hasill Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/03/18 Time: 15:40
 Sample: 2011 2016
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19.14377	0.375326	51.00574	0.0000
X1	-0.152705	0.017093	-8.933841	0.0000
X2	4.10E-08	1.29E-08	3.166223	0.0018
X3	-0.017028	0.007640	-2.228682	0.0271
X4	-4.40E-06	3.34E-07	-13.18823	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.987172	Mean dependent var	13.77600	

Adjusted R-squared	0.984321	S.D. dependent var	4.504289
S.E. of regression	0.564011	Akaike info criterion	1.858500
Sum squared resid	54.39661	Schwarz criterion	2.480106
Log likelihood	-156.1425	Hannan-Quinn criter.	2.109792
F-statistic	346.2838	Durbin-Watson stat	1.503213
Prob(F-statistic)	0.000000		

Fixed Effects (cross)

Kabupaten Cilacap	-0.89107
Kabupaten Banyumas	4.167579
Kabupaten Purbalingga	6.838863
Kabupaten Banjarnegara	4.654889
Kabupaten Kebumen	7.91767
Kabupaten Purworejo	1.886769
Kabupaten Wonosobo	8.243206
Kabupaten Magelang	0.091624
Kabupaten Boyolali	-0.40818
Kabupaten Klaten	1.91876
Kabupaten Sukoharjo	-3.67151
Kabupaten Wonogiri	0.079373
Kabupaten Karanganyar	-0.17046
Kabupaten Sragen	1.888229
Kabupaten Grobogan	0.974293
Kabupaten Blora	0.8586
Kabupaten Rembang	6.938331
Kabupaten Pati	-1.28771
Kabupaten Kudus	-6.95976
Kabupaten Jepara	-4.69717
Kabupaten Demak	2.995636
Kabupaten Semarang	-4.68087
Kabupaten Temanggung	-1.49763
Kabupaten Kendal	-0.84546
Kabupaten Batang	-1.44409
Kabupaten Pekalongan	0.089209
Kabupaten Pemasang	5.102994
Kabupaten Tegal	-3.43131
Kabupaten Brebes	6.226004
Kota Magelang	-3.00495
Kota Surakarta	-2.12212
Kota Salatiga	-5.81268

Kota Semarang	-11.2178
Kota Pekalongan	-4.47886
Kota Tegal	-4.25037

Dari hasil regresi fixed effect model pada tabel 4.8 maka di dapat persamaan linier :

$$\text{POV} = 19.14377 - 0.152705 \text{ INF} + 4.10\text{E-}08 \text{ PDRB} - 0.017028 \text{ pend} - 4.40\text{E-}06 \text{ UMK} + e$$

Dimana :

INF = Presentasi penduduk miskin di Kabupaten/Kota Jawa Tengah

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota Jawa Tengah

Pend = Pendidikan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah

UMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

4.3.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Pengukuran koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variable independent inflasi, PDRB, pendidikan, dan UMK terhadap variable dependent kemiskinan. Dari hasil regresi yang telah di lakukan dengan model fixed effect didapat hasil R^2 sebesar 0.987172 yang arti nya variable independent inflasi, PDRB, pendidikan, dan UMK dapat berpengaruh bersama-sama sebesar 98,7% dan sisa nya sebesar 1,3% di pengaruhi oleh variable lain di luar model.

4.3.2.2 Pengujian Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variable bebas terhadap variable dependent dengan menganggap variable bebas lainnya konstan. Adapun hasil uji-t dari masing-masing variable bebas terhadap variable dependent yang sudah di regresi :

1. Pengujian variable inflasi terhadap variable tingkat kemiskinan

$H_0 : \beta_i \geq 0$ variable inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variable tingkat kemiskinan.

$H_1 : \beta_i < 0$ artinya variable inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap variable tingkat kemiskinan.

Berdasarkan estimasi fixed effect model pada tabel 4.8 dengan hasil probabilitas inflasi sebesar 0,0000 maka Inflasi menolak H_0 dan menerima H_1 pada $\alpha = 1\%$ yang artinya Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena $0,000 < 0,01$.

2. Pengujian variable PDRB terhadap variable tingkat kemiskinan

$H_0 : \beta_i \geq 0$ variable PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variable tingkat kemiskinan.

$H_1 : \beta_i < 0$ artinya variable PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap variable tingkat kemiskinan.

Berdasarkan estimasi fixed effect model pada tabel 4.8 dengan probabilitas PDRB sebesar 0,0018 maka inflasi menolak H_0 dan menerima H_1 pada $\alpha = 1\%$ yang artinya PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena $0,0018 < 0,01$.

3. Pengujian variable Pendidikan terhadap variable tingkat kemiskinan

$H_0 : \beta_i \geq 0$ variable Pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variable tingkat kemiskinan.

$H_1 : \beta_i < 0$ artinya variable Pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap variable tingkat kemiskinan.

Berdasarkan estimasi fixed effect model pada tabel 4.8 dengan probabilitas Pendidikan sebesar 0,0271 maka inflasi menolak H_0 dan menerima H_1 pada $\alpha = 5\%$ yang artinya variable Pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena $0,0271 < 0,05$.

4. Pengujian variable inflasi terhadap variable tingkat kemiskinan

$H_0 : \beta_i \geq 0$ variable UMK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variable tingkat kemiskinan.

$H_1 : \beta_i < 0$ artinya variable UMK berpengaruh secara signifikan terhadap variable tingkat kemiskinan.

Berdasarkan estimasi fixed effect model pada tabel 4.8 dengan hasil probabilitas UMK sebesar 0,0000 maka UMK menolak H_0 dan menerima H_1 pada $\alpha = 1\%$ yang artinya UMK berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena $0,000 < 0,01$.

4.3.2.3 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variable bebas (independet) mempengaruhi variable terkait (dependent) secara bersama-sama atau tidak. Apabila nilai F tabel lebih kecil dari nilai F hasil perhitungan maka variable independent secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variable dependent. Dari hasil estimasi tabel 4.8 didapat kan hasil F-statistik sebesar 346.2838 dengan nilai probabilitas 0.000000 ($\alpha = 1\%$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variable independent (inflasi, PDRB, Pendidikan, UMK) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variable dependent (tingkat kemiskinan).

4.3.2.4 Analisis Intersep

Tabel 4.4

Analisis Intersept

Kabupaten Kota	Intersep	Koefisien	Konstanta
Kabupaten Cilacap	-0.891	19.14377	18.25277
Kabupaten Banyumas	4.1675	19.14377	23.31127
Kabupaten Purbalingga	6.8388	19.14377	25.98257
Kabupaten Banjarnegara	4.6548	19.14377	23.79857
Kabupaten Kebumen	7.9176	19.14377	27.06137
Kabupaten Purworejo	1.8867	19.14377	21.03047
Kabupaten Wonosobo	8.2432	19.14377	27.38697
Kabupaten Magelang	0.0916	19.14377	19.23537
Kabupaten Boyolali	-0.4081	19.14377	18.73567
Kabupaten Klaten	1.9187	19.14377	21.06247
Kabupaten Sukoharjo	-3.6715	19.14377	15.47227
Kabupaten Wonogiri	0.0793	19.14377	19.22307
Kabupaten Karanganyar	-0.1704	19.14377	18.97337
Kabupaten Sragen	1.8882	19.14377	21.03197
Kabupaten Grobogan	0.9742	19.14377	20.11797
Kabupaten Blora	0.8586	19.14377	20.00237
Kabupaten Rembang	6.9383	19.14377	26.08207
Kabupaten Pati	-1.2877	19.14377	17.85607
Kabupaten Kudus	-6.9597	19.14377	12.18407
Kabupaten Jepara	-4.6971	19.14377	14.44667
Kabupaten Demak	2.9956	19.14377	22.13937
Kabupaten Semarang	-4.6808	19.14377	14.46297
Kabupaten Temanggung	-1.4976	19.14377	17.64617
Kabupaten Kendal	-0.8454	19.14377	18.29837
Kabupaten Batang	-1.444	19.14377	17.69977
Kabupaten Pekalongan	0.0892	19.14377	19.23297
Kabupaten Pemalang	5.1029	19.14377	24.24667
Kabupaten Tegal	-3.4313	19.14377	15.71247
Kabupaten Brebes	6.226	19.14377	25.36977
Kota Magelang	-3.0049	19.14377	16.13887
Kota Surakarta	-2.1221	19.14377	17.02167
Kota Salatiga	-5.8126	19.14377	13.33117
Kota Semarang	-11.2178	19.14377	7.92597
Kota Pekalongan	-4.4788	19.14377	14.66497
Kota Tegal	-4.2503	19.14377	14.89347

Dari Tabel 4.4 didapatkan bahwa Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Rembang memiliki nilai konstanta yang tinggi, sehingga apabila diasumsikan seluruh variabel independen dalam penelitian tidak berpengaruh, maka Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Rembang memiliki prosentase penduduk miskin yang tinggi, artinya Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Rembang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang rendah dibandingkan wilayah lain di Provinsi Jawa tengah. Sedangkan Kota Semarang dan Kabupaten Kudus memiliki nilai konstanta yang paling rendah, apabila diasumsikan seluruh variabel independen dalam penelitian tidak berpengaruh, maka Kota Semarang dan Kabupaten Kudus memiliki prosentase penduduk miskin yang rendah, artinya Kota Semarang dan Kabupaten Kudus memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Tengah.

4.3.3 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

4.3.3.3 Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat

kemiskinan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan terbukti bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal ini

berarti ketika inflasi mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.152705.

Pada hakikat nya ketika laju inflasi meningkat maka akan meningkatkan juga batas garis kemiskinan. Ketika laju inflasi mengalami kenaikan hal tersebut akan berdampak pada meningkat nya jumlah penduduk miskin apa bila daya beli dan pendapatan tidak mengalami peningkatan juga terutama pada masyarakat yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Namun dalam penelitian ini tidak sesuai dengan pendapat tersebut. Hal tersebut disebabkan karena ada nya peningkatan daya beli masyarakat di Jawa Tengah sehingga kenaikan harga justru akan mengurangi penduduk miskin yang ada di Jawa Tengah.

Pada dasar nya inflasi meningkatkan harga-harga seperti sandang, pangan dan papan, namun mayoritas penduduk miskin yang ada di Jawa Tengah tinggal di desa dan inflasi tidak terlalu berdampak terhadap penduduk desa. Hal tersebut di karenakan warga desa pada umum nya jarang sekali merenovasi rumah sehingga ketika harga bahan bangunan (papan) naik tidak akan terlalu memberatkan penduduk desa, dan ketika harga kain (sandang) naik juga tidak akan terlalu berpengaruh terhadap mereka karena bagi orang desa dalam membeli pakaian tidak terlalu sering seperti orang yang ada di kota dengan begitu ketika

harga sandang naik maka tidak akan terlalu berpengaruh terhadap penduduk yang ada di desa. Dan pada permasalahan pangan mayoritas penduduk desa bercocok tanam sendiri sehingga ketika harga pangan naik mereka dapat mengambil hasil tanaman mereka sendiri.

Dan sesuai dengan kurva philip inflasi akan menurunkan tingkat kemiskinan melalui pengurangan jumlah pengangguran. Pada saat inflasi meningkat maka jumlah pengangguran yang ada pun akan berkurang dan apabila inflasi menurun maka pengangguran akan semakin meningkat. Ketika pengangguran menurun maka masyarakat akan mendapatkan pendapatan yang dapat menunjang kehidupan mereka. Saat masyarakat memiliki pendapatan yang baik maka konsumsi masyarakat akan lebih baik dan akan mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan, sehingga hal tersebut akan menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Namun hubungan inflasi dengan pengangguran ini hanya berpengaruh dalam jangka pendek saja. Tetapi inflasi yang terlalu tinggi juga tidak baik untuk Indonesia. Maka pemerintah diharapkan dapat mengendalikan laju inflasi agar inflasi yang ada tetap stabil karna ketika inflasi itu stabil maka akan menyebabkan adanya pengangguran natural. Sobel (2009) menjelaskan bahwa tingkat pengangguran natural adalah tingkat pengangguran yang “normal” sesuai dengan kondisi friksional dan struktural

dalam pasar tenaga kerja. Di sinilah akan tercipta full employment

Analisis Pengaruh PDRB terhadap Tingkat kemiskinan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan terbukti bahwa PDRB berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal ini berarti ketika PDRB mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 0,0000000041. Hasil penelitian ini sejalan dengan Cholili (2014) yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada yaitu semakin tinggi PDRB maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal tersebut bisa jadi disebabkan karena PDRB tidak mencerminkan pendapatan perkapita yang mengalami kenaikan namun ketika PDRB mengalami kenaikan hanya pendapatan perorangan saja yang mengalami kenaikan sehingga hal tersebut menyebabkan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut menyebabkan PDRB tidak tersalurkan secara merata pada setiap masyarakat. Menurut buku Todaro mengenai gini ratio, ketika gini ratio 0,35-0,5 menandakan bahwa daerah tersebut memiliki ketimpangan yang sedang. Dan di Jawa Tengah memiliki gini ratio sebesar 0.38 yang artinya di daerah Jawa Tengah memiliki ketimpangan yang sedang.

4.3.3.4 Analisis Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat

kemiskinan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan terbukti bahwa Pendidikan berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal ini berarti ketika Pendidikan mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.017028. Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada.

Penelitian Dores (2014) juga menjelaskan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam penurunan kemiskinan. Ketika mutu pendidikan membaik maka akan meningkatkan ketrampilan dan produktivitas yang akan berdampak terhadap kenaikan kesempatan kerja. Ketika kesempatan kerja meningkat yang didukung juga dengan peningkatan lapangan kerja dapat menyebabkan kenaikan pendapatan yang kemudian ada menurunkan tingkat kemiskinan yang ada.

4.3.3.5 Analisis Pengaruh UMK terhadap Tingkat kemiskinan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan terbukti bahwa UMK berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal ini berarti ketika UMK mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat

kemiskinan sebesar 0,00000044. Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada yang berarti ketika upah mengalami kenaikan maka akan menurunkan kemiskinan.

Ketika upah mengalami kenaikan maka akan menjadikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan hal tersebut dapat menghindarkan masyarakat dari kemiskinan yang ada. Akan tetapi turunnya upah dapat menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan karena penurunan upah dapat menaikkan harga-harga barang atau tidak sebanding dengan upah yang mereka terima.

Seperti yang dijelaskan oleh penelitian Yanthi dan Marhaeni (2015) yang menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditentukan dengan pendapatan yang mereka terima. Kenaikan upah menguntungkan bagi pihak buruh/ pekerja dan pengusaha karena hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan kemiskinan.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah di jelaskan di atas maka dapat di ambil kesimpulan :

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
2. Hasil penelitian membuktikan bahwa PDRB berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3. Hasil penelitian membuktikan bahwa Pendidikan berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah..
4. Hasil penelitian membuktikan bahwa UMK berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

4.2 Implikasi

Berdasarkan uraian penelitian diatas, maka saran yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dengan melihat hasil yang ada pada penelitian ini hendaknya pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat berusaha mengendalikan tingkat infalsi agar dapat mengurangi kemiskinan yang ada namun juga tidak membahayakan untuk negara.

2. Hasil yang di dapat pada penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap kemiskinan, hasil ini tidak sesuai dengan teori yang ada. Hal ini mungkin dapat disebabkan karena kemungkinan PDRB di Jawa Tengah tidak menyentuh secara merata kepada penduduk miskin yang ada. Sehingga perlu nya peran pemerintah dalam pentingnya pemerataan pertumbuhan ekonomi.
3. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan memiliki peranan yang penting dalam menekan angka kemiskinan. Oleh sebab itu diperlukan perbaikan sarana dan prasarana dan pemerataan pendidikan terutama pada daerah-daerah pinggiran guna memperbaiki kualitas pendidikan.
4. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa UMK memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Perananan pemerintah disini sangat dibutuhkan dalam penentuan UMK karena UMK dapat menaikkan taraf hidup masyarakat dan dapat menekan angka kemiskinan yang ada. Pemerintah dapat meningkatkan UMK namun dengan memperbaiki sumber daya manusia nya sehingga tidak merugikan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nizar Chairul, Hamzah Abubakar dan Syahnur Sofyan (2013). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Volume 1, No. 2, Mei 2013. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Barika (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Infansi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera. Volume 05 Nomor 01, Januari-Juni 2013.
- Zuhdiyaty Noor (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi). *Jibeka* Volume 11 No 2 Februari 2017: 27 – 31. Universitas Brawijaya.
- Busra (2011). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Aceh. Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mustika Candra (2011) Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. Vol.1, No.4 Oktober 2011. Universitas Jambi, Kampus Pinang Masak.
- Rusdarti dan Karolina Sebayang Lesta (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Economia*. Volume9,Nomor1,April2013. Universitas Negri Semarang.
- Agustina Mega Puspitasari Putri (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Subri, Mulyadi (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta:PT. Raja

Grafindo Persada.

Badan Pusat Statistik. *Jawa Tengah Dalam Angka berbagai edisi*. Jakarta: Badan

Pusat Statistik.

Todaro M.P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga,

Jakarta.

Arsyad, I, (2010). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN.

Boediono. (1989). *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2*.

Edisi 4, BPF, Yogyakarta.

Lampiran

Lampiran I

Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Kota di Jawa Tengah (Dalam persen)

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PROVINSI JAWA TENGAH	16.21	14.98	14.44	13.58	13.58	13.27
Kabupaten Cilacap	17.15	15.92	15.24	14.21	14.39	14.12
Kabupaten Banyumas	21.11	19.44	18.44	17.45	17.52	17.23
Kabupaten Purbalingga	23.06	21.19	20.53	19.75	19.70	18.98
Kabupaten Banjarnegara	20.38	18.87	18.71	17.77	18.37	17.46
Kabupaten Kebumen	24.06	22.40	21.32	20.50	20.44	19.86
Kabupaten Purworejo	17.51	16.32	15.44	14.41	14.27	13.91
Kabupaten Wonosobo	24.21	22.50	22.08	21.42	21.45	20.53
Kabupaten Magelang	15.18	13.97	13.96	12.98	13.07	12.67
Kabupaten Boyolali	14.97	13.88	13.27	12.36	12.45	12.09
Kabupaten Klaten	17.95	16.71	15.60	14.56	14.89	14.46
Kabupaten Sukoharjo	11.13	10.15	9.87	9.18	9.26	9.07
Kabupaten Wonogiri	15.74	14.67	14.02	13.09	12.98	13.12
Kabupaten Karanganyar	15.29	14.07	13.58	12.62	12.46	12.49
Kabupaten Sragen	17.95	16.72	15.93	14.87	14.86	14.38
Kabupaten Grobogan	17.38	16.13	14.87	13.86	13.68	13.57
Kabupaten Blora	16.24	15.10	14.64	13.66	13.52	13.33
Kabupaten Rembang	23.71	21.88	20.97	19.50	19.28	18.54
Kabupaten Pati	14.69	13.61	12.94	12.06	11.95	11.65
Kabupaten Kudus	9.45	8.63	8.62	7.99	7.73	7.65
Kabupaten Jepara	10.32	9.38	9.23	8.55	8.50	8.35
Kabupaten Demak	18.21	16.73	15.72	14.60	14.44	14.10
Kabupaten Semarang	10.30	9.40	8.51	8.05	8.15	7.99
Kabupaten Temanggung	13.38	12.32	12.42	11.55	11.76	11.60
Kabupaten Kendal	14.26	13.17	12.68	11.80	11.62	11.37
Kabupaten Batang	13.47	12.40	11.96	11.13	11.27	11.04
Kabupaten Pekalongan	15	13.85	13.51	12.57	12.84	12.90
Kabupaten Pemalang	20.68	19.27	19.27	18.44	18.30	17.58
Kabupaten Tegal	11.54	10.75	10.58	9.87	10.09	10.10

Kabupaten Brebes	22.72	21.12	20.82	20	19.79	19.47
Kota Magelang	11.06	10.31	9.80	9.14	9.05	8.79
Kota Surakarta	12.90	12	11.74	10.95	10.89	10.88
Kota Salatiga	7.80	7.11	6.40	5.93	5.80	5.24
Kota Semarang	5.68	5.13	5.25	5.04	4.97	4.85
Kota Pekalongan	10.04	9.47	8.26	8.02	8.09	7.92
Kota Tegal	10.81	10.04	8.84	8.54	8.26	8.20

Sumber : Badan Pusat Statistik (2017)

Lampiran II

Inflasi Kabupaten Kota di Jawa Tengah (Dalam Persen)

Kabupaten Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PROVINSI JAWA TENGAH	2.68	4.24	7.99	8.22	2.73	2.36
Kabupaten Cilacap	5.27	6.87	8.37	8.19	2.63	2.77
Kabupaten Banyumas	3.40	4.73	8.50	7.09	2.52	2.42
Kabupaten Purbalingga	4.47	4.09	9.57	9.08	1.62	2.39
Kabupaten Banjarnegara	4.73	4.55	8.35	7.78	2.97	2.87
Kabupaten Kebumen	4.52	4.64	10.46	7.36	2.91	2.71
Kabupaten Purworejo	2.52	3.66	7.14	8.48	3.45	2.66
Kabupaten Wonosobo	2.66	3.84	8.82	8.44	2.71	2.97
Kabupaten Magelang	2.64	2.59	8.34	7.91	3.60	2.86
Kabupaten Boyolali	3.35	3.45	8.21	7.45	2.58	2.65
Kabupaten Klaten	1.67	3.65	7.92	7.76	2.57	2.31
Kabupaten Sukoharjo	2.63	4.22	8.42	7.93	2.69	2.34
Kabupaten Wonogiri	3	3.43	8.60	7.20	2.13	2.94
Kabupaten Karanganyar	3.31	3.29	8.70	7.38	2.40	1.93
Kabupaten Sragen	2.86	3.74	7.55	8.51	3.05	2.49
Kabupaten Grobogan	1.86	4.48	7.88	8.03	3.31	2.41
Kabupaten Blora	2.26	3.55	7.94	7.13	2.85	2.14
Kabupaten Rembang	2.73	4.28	6.88	7.59	2.66	1.75
Kabupaten Pati	2.30	3.92	7.57	8.01	3.23	2.31
Kabupaten Kudus	3.34	4.77	8.31	8.59	3.28	2.32
Kabupaten Jepara	3.59	4.52	7.95	9.87	4.57	3.45
Kabupaten Demak	3.49	4.10	8.22	8.69	2.80	2.27
Kabupaten Semarang	3.29	4.56	8.11	8.63	2.85	2.39
Kabupaten Temanggung	2.42	4.73	7.01	7.81	2.74	2.42
Kabupaten Kendal	3.49	3.89	6.90	8.34	4.13	2.47
Kabupaten Batang	3.01	3.83	8.08	7.66	2.94	2.24

Kabupaten Pekalongan	2.65	2.96	8.18	8.32	3.42	2.96
Kabupaten Pemalang	2.80	4.04	6.52	7.38	3.52	2.33
Kabupaten Tegal	2.74	4.13	7.79	8.48	3.64	2.67
Kabupaten Brebes	3.09	4.61	9.83	6.20	3.08	2.84
Kota Magelang	4.15	6.05	7.79	7.92	2.70	2.25
Kota Surakarta	1.93	2.87	8.32	8.01	2.56	2.15
Kota Salatiga	2.84	4.12	7.67	7.84	2.61	2.19
Kota Semarang	2.87	0.41	8.19	8.53	2.56	2.32
Kota Pekalongan	2.45	3.55	7.40	7.82	3.46	2.94
Kota Tegal	2.58	0.40	5.80	7.40	3.95	2.71

Sumber : Badan Pusat Statistik (2017)

Lampiran III

PDRB Kabupaten Kota di Jawa Tengah (Dalam Juta)

Kabupaten Kota	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
Cilacap	78.936.521	77.450.141	86.477.559	92.025.901	98.831.586	100.155.799
Banyumas	26.059.371	28.486.872	31.369.317	34.923.374	38.798.789	42.016.940
Purbalingga	12.205.358	13.448.654	14.791.295	16.630.445	18.423.659	19.923.741
Banjarnegara	10.589.798	11.533.728	12.751.207	14.342.957	15.847.808	17.241.466
Kebumen	13.766.060	15.126.968	16.526.133	18.645.422	20.762.286	22.315.248
Purworejo	9.585.146	10.471.685	11.462.756	12.660.418	13.846.863	14.968.991
Wonosobo	10.045.107	10.899.446	11.749.524	13.001.090	14.150.509	15.365.351
Magelang	16.179.965	17.738.492	19.602.844	21.923.411	24.131.644	26.223.219
Boyolali	15.561.176	16.987.107	18.806.295	21.117.415	23.550.823	25.929.835
Klaten	19.372.039	21.348.291	23.345.149	26.270.890	28.988.778	31.558.691
Sukoharjo	18.394.170	20.248.720	22.048.803	24.407.488	26.711.546	29.094.614
Wonogiri	14.506.500	16.024.068	17.640.990	19.668.236	21.572.475	23.281.134
Karanganyar	18.757.479	20.269.679	22.219.243	24.635.058	26.904.049	29.322.302
Sragen	18.103.684	19.887.564	21.870.800	24.569.005	27.309.123	29.617.342
Grobogan	13.886.641	15.217.930	16.626.336	18.181.835	20.182.089	21.737.317
Blora	11.373.376	12.285.562	13.543.661	15.101.975	16.368.347	19.964.349
Rembang	9.352.791	10.323.373	11.441.103	12.821.715	13.897.816	14.867.075
Pati	21.048.733	23.360.037	25.931.377	28.504.861	31.224.449	33.646.610
Kudus	56.936.183	63.448.329	70.323.525	78.810.084	84.617.116	90.150.643
Jepara	14.827.688	16.381.419	18.022.612	20.067.294	22.071.848	23.903.616
Demak	12.900.563	14.207.562	15.770.997	17.381.397	19.330.295	20.843.920
Semarang	24.440.560	27.024.981	29.789.069	33.160.762	36.429.157	40.100.266
Temanggung	10.870.286	11.841.494	13.088.402	14.592.453	16.107.061	17.526.473
Kendal	21.121.513	23.112.029	25.274.543	28.194.358	30.908.074	33.776.400
Batang	10.719.485	11.687.587	12.886.461	14.408.439	15.908.510	17.200.827
Pekalongan	11.496.781	12.505.866	13.757.494	15.268.426	16.804.659	18.228.695
Pemalang	12.497.538	13.635.672	15.032.617	16.751.917	18.491.385	20.036.515

Tegal	17.194.572	18.761.760	20.767.110	23.108.651	25.590.642	27.727.792
Brebes	22.903.892	24.668.258	27.437.547	30.899.921	34.447.079	37.340.820
Magelang	4.464.559	4.888.146	5.356.942	5.926.218	6.480.578	7.015.380
Surakarta	23.909.011	26.425.273	29.081.312	32.062.446	34.982.374	37.793.266
Salatiga	6.611.458	7.295.224	7.990.573	8.870.865	9.718.060	10.551.362
Semarang	91.034.098	99.755.672	108.807.145	122.109.871	134.206.715	145.993.676
Pekalongan	5.183.065	5.741.728	6.396.422	7.092.776	7.778.271	8.507.535
Tegal	7.752.829	8.371.206	9.136.585	10.060.187	10.984.998	11.886.655

Sumber : Badan Pusat Statistik (2017)

Lampiran IV

Angka Partisipasi Sekolah (Dalam Persen)

Kabupaten/ Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PROVINSI JAWA TENGAH	55	58.56	59.81	67.54	67.66	67.95
Kabupaten Cilacap	47.09	48.64	73.46	75.86	64.63	74.71
Kabupaten Banyumas	56.26	66.5	61.3	70.15	68.38	71.33
Kabupaten Purbalingga	44.62	49.36	41.8	52.28	66.78	67.51
Kabupaten Banjarnegara	43.06	34.6	47.05	51.3	66.42	54.4
Kabupaten Kebumen	72.63	77.73	69.63	75.75	76.66	80.32
Kabupaten Purworejo	71.78	75.96	65.33	80.39	73.17	77.79
Kabupaten Wonosobo	37.61	43.46	37.42	43.66	48.97	51.22
Kabupaten Magelang	58.24	58.35	54.13	59.96	63.39	67.24
Kabupaten Boyolali	65.28	56.46	63.39	72.82	74.77	57.73
Kabupaten Klaten	67.05	75.64	77.77	82.75	79.91	75.8
Kabupaten Sukoharjo	72.7	64.34	73.62	85.67	85.26	81.03
Kabupaten Wonogiri	66.4	62.49	62.55	82.6	72.47	73.11
Kabupaten Karanganyar	68.73	69.67	68.35	75.21	77.57	81.47
Kabupaten Sragen	65.25	68.3	74.73	77.45	73.17	77.72
Kabupaten Grobogan	50.32	56.52	52.04	63.47	65.72	59.21
Kabupaten Blora	48.48	52.54	64.15	72.67	69.32	60.11
Kabupaten Rembang	58.05	48.34	60.6	67.41	66.88	60.97
Kabupaten Pati	53.58	57.93	51.29	67.19	65.55	68.63
Kabupaten Kudus	55.45	59.94	55.38	60.4	67.3	75.74
Kabupaten Jepara	39.8	54.9	54.67	58.36	68.12	62.74
Kabupaten Demak	57.15	67.39	60.38	69.17	66.57	61.76
Kabupaten Semarang	54.21	69.96	56.1	61.34	59.72	71.09

Kabupaten Temanggung	43.24	43.52	47.09	52.8	52.11	65.09
Kabupaten Kendal	52.04	59.41	63.14	73.66	72.61	67.77
Kabupaten Batang	42.06	47.98	38.83	50.65	66.84	64.48
Kabupaten Pekalongan	53.9	45.39	46.35	51.71	56.16	55.41
Kabupaten Pemasang	39.2	48.78	50.93	59.92	60.41	56.01
Kabupaten Tegal	53.93	57.49	60.34	69.71	68.14	62.39
Kabupaten Brebes	43.83	47.19	54.88	62.16	51.99	56.68
Kota Magelang	72.43	66.25	78.23	88.97	73.15	83.3
Kota Surakarta	77.47	64.34	69.42	81.22	82.89	86.48
Kota Salatiga	72.73	82.53	84.25	87	75.9	85.27
Kota Semarang	65.72	69.22	75.33	80.49	79.63	83.56
Kota Pekalongan	44.85	48.84	49.45	50.64	60.66	66.08
Kota Tegal	60.84	58.33	64.23	70.15	74.37	65.57

Sumber : Badan Pusat Statistik (2017)

Lampiran V

Data UMK (Dalam Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Cilacap	718 666.67	773 000.00	986 000.00	1 125 000.00	1 287 000.00	1 608 000.00
Kabupaten Banyumas	750 000.00	795 000.00	877 500.00	1 000 000.00	1 100 000.00	1 350 000.00
Kabupaten Purbalingga	765 000.00	818 500.00	896 500.00	1 023 000.00	1 101 600.00	1 377 500.00
Kabupaten Banjarnegara	730 000.00	765 000.00	835 000.00	920 000.00	1 112 500.00	1 265 000.00
Kabupaten Kebumen	727 500.00	770 000.00	835 000.00	975 000.00	1 157 500.00	1 324 600.00
Kabupaten Purworejo	755 000.00	809 000.00	849 000.00	910 000.00	1 165 000.00	1 300 000.00
Kabupaten Wonosobo	775 000.00	825 000.00	880 000.00	990 000.00	1 166 000.00	1 326 000.00
Kabupaten Magelang	802 500.00	870 000.00	942 000.00	1 152 000.00	1 255 000.00	1 410 000.00
Kabupaten Boyolali	800 500.00	836 000.00	895 000.00	1 116 000.00	1 197 800.00	1 403 500.00
Kabupaten Klaten	766 022.00	812 000.00	871 500.00	1 026 600.00	1 170 000.00	1 400 000.00
Kabupaten Sukoharjo	790 500.00	843 000.00	902 000.00	1 150 000.00	1 223 000.00	1 396 000.00
Kabupaten Wonogiri	730 000.00	775 000.00	830 000.00	954 000.00	1 101 000.00	1 293 000.00
Kabupaten Karanganyar	801 500.00	846 000.00	896 500.00	1 060 000.00	1 226 000.00	1 420 000.00
Kabupaten Sragen	760 000.00	810 000.00	864 000.00	960 000.00	1 105 000.00	1 300 000.00

Kabupaten Grobogan	735 000.00	785 000.00	842 000.00	935 000.00	1 160 000.00	1 305 000.00
Kabupaten Blora	816 200.00	855 500.00	932 000.00	1 009 000.00	1 180 000.00	1 328 500.00
Kabupaten Rembang	757 600.00	816 000.00	896 000.00	985 000.00	1 120 000.00	1 300 000.00
Kabupaten Pati	769 550.00	837 500.00	927 600.00	1 013 027.00	1 176 500.00	1 310 000.00
Kabupaten Kudus	840 000.00	889 000.00	990 000.00	1 150 000.00	1 380 000.00	1 608 200.00
Kabupaten Jepara	758 000.00	800 000.00	875 000.00	1 000 000.00	1 150 000.00	1 350 000.00
Kabupaten Demak	847 987.00	893 000.00	995 000.00	1 280 000.00	1 535 000.00	1 745 000.00
Kabupaten Semarang	880 000.00	941 600.00	1 051 000.00	1 208 200.00	1 419 000.00	1 610 000.00
Kabupaten Temanggung	779 000.00	866 000.00	940 000.00	1 050 000.00	1 178 000.00	1 313 000.00
Kabupaten Kendal	843 750.00	893 000.00	953 100.00	1 206 000.00	1 383 450.00	1 639 600.00
Kabupaten Batang	805 000.00	880 000.00	970 000.00	1 146 000.00	1 270 000.00	1 467 500.00
Kabupaten Pekalongan	810 000.00	873 000.00	962 000.00	1 145 000.00	1 271 000.00	1 463 000.00
Kabupaten Pemalang	725 000.00	793 000.00	908 000.00	1 066 000.00	1 193 400.00	1 325 000.00
Kabupaten Tegal	725 000.00	795 000.00	850 000.00	1 000 000.00	1 155 000.00	1 373 000.00
Kabupaten Brebes	717 000.00	775 000.00	859 000.00	1 000 000.00	1 166 550.00	1 310 000.00
Kota Magelang	795 000.00	837 000.00	915 900.00	1 145 000.00	1 211 000.00	1 341 000.00
Kota Surakarta	826 252.00	864 450.00	974 000.00	1 170 000.00	1 222 400.00	1 418 000.00
Kota Salatiga	843 469.00	901 396.00	1 209 100.00	1 423 500.00	1 287 000.00	1 450 953.00
Kota Semarang	961 323.00	991 500.00	980 000.00	1 165 000.00	1 685 000.00	1 909 000.00
Kota Pekalongan	810 000.00	895 500.00	860 000.00	1 044 000.00	1 291 000.00	1 500 000.00
Kota Tegal	735 000.00	795 000.00	914 275.68	1 066 603.43	1 206 000.00	1 385 000.00

Sumber : Badan Pusat Statistik (2017)

Lampiran VI

Data Gini Ratio

Wilayah Jateng	Gini Rasio				
	2011	2012	2013	2014	2015
PROVINSI JAWA TENGAH	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38
Kabupaten Cilacap	0.3	0.32	0.37	0.34	0.34
Kabupaten Banyumas	0.35	0.34	0.36	0.32	0.32
Kabupaten Purbalingga	0.28	0.33	0.32	0.3	0.3
Kabupaten Banjarnegara	0.36	0.33	0.39	0.34	0.34
Kabupaten Kebumen	0.34	0.35	0.31	0.28	0.28
Kabupaten Purworejo	0.36	0.31	0.34	0.38	0.38
Kabupaten Wonosobo	0.35	0.38	0.34	0.35	0.35
Kabupaten Magelang	0.32	0.33	0.34	0.34	0.34
Kabupaten Boyolali	0.36	0.38	0.4	0.3	0.3
Kabupaten Klaten	0.32	0.33	0.34	0.36	0.36
Kabupaten Sukoharjo	0.33	0.35	0.34	0.35	0.35
Kabupaten Wonogiri	0.35	0.32	0.34	0.33	0.33
Kabupaten Karanganyar	0.37	0.4	0.33	0.36	0.36
Kabupaten Sragen	0.35	0.37	0.35	0.33	0.33
Kabupaten Grobogan	0.32	0.35	0.34	0.34	0.34
Kabupaten Blora	0.33	0.38	0.41	0.39	0.39
Kabupaten Rembang	0.27	0.33	0.32	0.33	0.33
Kabupaten Pati	0.29	0.29	0.3	0.31	0.31
Kabupaten Kudus	0.35	0.34	0.34	0.37	0.37
Kabupaten Jepara	0.32	0.35	0.33	0.31	0.31
Kabupaten Demak	0.31	0.34	0.33	0.32	0.32
Kabupaten Semarang	0.33	0.36	0.31	0.31	0.31
Kabupaten Temanggung	0.38	0.35	0.34	0.38	0.38
Kabupaten Kendal	0.37	0.36	0.32	0.34	0.34
Kabupaten Batang	0.28	0.31	0.3	0.29	0.29
Kabupaten Pekalongan	0.28	0.28	0.27	0.29	0.29
Kabupaten Pemalang	0.26	0.25	0.24	0.28	0.28
Kabupaten Tegal	0.28	0.32	0.32	0.33	0.33
Kabupaten Brebes	0.33	0.32	0.31	0.32	0.32
Kota Magelang	0.34	0.37	0.33	0.36	0.36

Kota Surakarta	0.33	0.37	0.35	0.36	0.36
Kota Salatiga	0.34	0.35	0.37	0.35	0.35
Kota Semarang	0.35	0.35	0.35	0.31	0.31
Kota Pekalongan	0.31	0.33	0.32	0.34	0.34
Kota Tegal	0.32	0.33	0.32	0.31	0.31

Lampiran VII

Hasil Olah Data

Common Effect

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/03/18 Time: 15:38
 Sample: 2011 2016
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.22503	1.820812	13.85372	0.0000
X1	-0.117238	0.116610	-1.005382	0.3159
X2	-3.12E-08	1.28E-08	-2.438338	0.0156
X3	-0.088364	0.025978	-3.401549	0.0008
X4	-4.31E-06	1.35E-06	-3.201691	0.0016
R-squared	0.220538	Mean dependent var		13.77600
Adjusted R-squared	0.205329	S.D. dependent var		4.504289
S.E. of regression	4.015319	Akaike info criterion		5.641632
Sum squared resid	3305.171	Schwarz criterion		5.721325
Log likelihood	-587.3714	Hannan-Quinn criter.		5.673849
F-statistic	14.50046	Durbin-Watson stat		0.054514
Prob(F-statistic)	0.000000			

Fixed Effect

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/03/18 Time: 15:40
 Sample: 2011 2016
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19.14377	0.375326	51.00574	0.0000
X1	-0.152705	0.017093	-8.933841	0.0000
X2	4.10E-08	1.29E-08	3.166224	0.0018
X3	-0.017028	0.007640	-2.228682	0.0271
X4	-4.40E-06	3.34E-07	-13.18823	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.987172	Mean dependent var	13.77600
Adjusted R-squared	0.984321	S.D. dependent var	4.504289
S.E. of regression	0.564011	Akaike info criterion	1.858500
Sum squared resid	54.39661	Schwarz criterion	2.480106
Log likelihood	-156.1425	Hannan-Quinn criter.	2.109792
F-statistic	346.2838	Durbin-Watson stat	1.503213
Prob(F-statistic)	0.000000		

Random Effect

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 01/03/18 Time: 15:50
 Sample: 2011 2016
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 210
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19.27829	0.703918	27.38713	0.0000
X1	-0.149304	0.017054	-8.754913	0.0000
X2	2.61E-08	1.17E-08	2.232767	0.0266
X3	-0.018189	0.007586	-2.397749	0.0174
X4	-4.12E-06	3.18E-07	-12.95524	0.0000

Effects Specification

		S.D.	Rho
Cross-section random		3.532620	0.9751
Idiosyncratic random		0.564011	0.0249
Weighted Statistics			
R-squared	0.709251	Mean dependent var	0.896020
Adjusted R-squared	0.703577	S.D. dependent var	1.083342
S.E. of regression	0.589823	Sum squared resid	71.31757
F-statistic	125.0186	Durbin-Watson stat	1.115731
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.068072	Mean dependent var	13.77600
Sum squared resid	3951.674	Durbin-Watson stat	0.020136

1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	300.560663	(34,171)	0.0000
Cross-section Chi-square	862.457725	34	0.0000

2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.192367	4	0.0001